MODUL 1



Saya Indonesia Saya Pancasila

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 1 : Saya Indonesia Saya Pancasila

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

ttd

Harris Iskandar

Daftar Isi



BANGGA CINTA PANCASILA

Pengantar Modul

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Seorang warga negara Indonesia yang bangga dan cinta pada Pancasila tentu memiliki komitmen untuk mendukung dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-sehari sebagaimana syair lagu berikut ini.

Jika sebuah rumah dibangun diatas pasir, apa jadinya? Bangunan rumah itu akan mudah roboh ketika dihempas angin kencang atau badai yang menerjang. Sebagaimana bangunan rumah, suatu negara akan berdiri kokoh jika dibangun diatas fondasi atau dasar negara yang kuat. Pancasila adalah dasar negara, fondasi bagi berdirinya sebuah bangunan yang bernama negara Indonesia. Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh maka dasar negara Pancasila harus kokoh dan kuat. Pancasila kokoh dan kuat jika seluruh warga negara Indonesia melaksanakan nilai-nilai Pancasila, mendukung dan mempertahankannya.



Warga negara Indonesia wajib tahu bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara. Dengan demikian kita sebagai warga negara akan memahami betapa besar jasa dan pengorbanan mereka dalam mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.

Mari kita pelajari Modul “Bangga Cinta Pancasila” yang diuraikan dalam tiga unit ini. Unit 1 sampai dengan 3 merupakan satu rangkaian peristiwa sejarah yang dimulai dari masuknya Jepang ke Indonesia tahun 1942 hingga Sidang PPKI pada18 Agustus 1945. Sebagaimana dijelaskan di depan, Unit 1 “Rentang Waktu Perumusan” memuat uraian tentang waktu (tonggak-tonggak sejarah) masuknya Jepang ke Indonesia yang kemudian terdesak oleh sekutu, janji kemerdekaan, pembentukan BPUPKI, dan proses perumusan dasar negara. Unit 2 “Mengukuhkan Pancasila” memuat uraian tentang pembentukan PPKI, Proklamasi Kemerdekaan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI. Unit 3 “Keteladanan Founding Fathers” menguraikan tentang semangat dan komitmen para pendiri negara serta pentingnya komitmen kita sebagai warga negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 1 dengan tema “Bangga Cinta Pancasila” ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Bangga Cinta Pancasila		
UNIT 1 Rentang Waktu Perumusan	**UNIT 2 Mengukuhkan Pancasila**	**UNIT 3 Keteladanan Founding Fathers**
Materi : • Pembentukan BPUPKI • Usulan dasar negara oleh tokoh pendiri negara • Piagam Jakarta **Penugasan :** Membandingkan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para tokoh pendiri negara	**Materi :** • Pembentukan PPKI • Penetapan Pancasila **Penugasan :** Menganalisis perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan rumusan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	**Materi :** • Semangat dan komitmen para pendiri Negara • Komitmen terhadap Pancasila **Penugasan :** Mengumpulkan gambar tokoh pendiri negara
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 1 Rentang Waktu Perumusan, memuat penjelasan mengenai waktu proses perumusan dasar negara sampai dengan dihasilkannya Piagam Jakarta; Unit 2 Mengukuhkan Pancasila, memuat uraian tentang pembentukan PPKI sampai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara; dan Unit 3 Keteladanan *Founding Fathers*, menguraikan keteladanan para tokoh dalam

perjuangan mewujudkan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

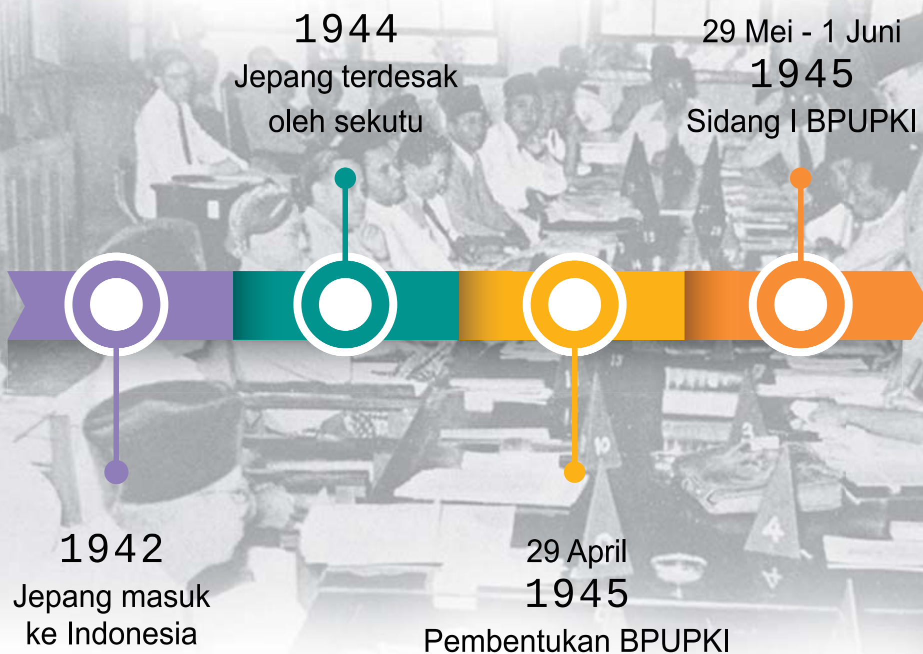
1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menghormati teman yang berbeda agama.
2. Menunjukkan sikap tanggungjawab dengan menyelesaikan tugas-tugas dalam mempelajari modul.
3. Menjelaskan pembentukan BPUPKI.
4. Membandingkan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para tokoh pendiri negara.
5. Menjelaskan penetapan Pancasila oleh PPKI
6. Menjelaskan perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
7. Menunjukkan nilai-nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan/ penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
8. Mengenali tokoh-tokoh pendiri negara dengan keteladannya.
9. Mengimplementasikan nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

UNIT 1 RENTANG WAKTU PERUMUSAN



Proses perumusan dasar negara Pancasila, dimulai dari waktu pembentukan Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh Pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Selanjutnya perumusan dasar negara dilakukan dalam persidangan-persidangan BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI, apakah Jepang benar-benar ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa tugas BPUPKI, kapan BPUPKI bersidang, dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan usul rancangan dasar negara dalam persidangan BPUPKI? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mari kita simak uraian berikut ini.

A. Pembentukan BPUPKI

Pepatah yang berbunyi “Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” menggambarkan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Lepas dari penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ganti dijajah oleh Jepang yang mulai masuk dan menguasai Indonesia pada 8 Maret 1942.




sumber: dnlxenology.com/www.dictio.id

Gambar 1. Masa penjajahan Jepang

Pada waktu itu Jepang mengetahui apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia, dengan mempromosikan semboyan “Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia”.

Tetapi kenyataannya sama saja, Jepang adalah penjajah yang tak kalah kejamnya dengan Belanda sehingga menyebabkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Indonesia diantaranya penderitaan yang disebabkan oleh peraturan Jepang tentang kerja paksa yang disebut romusha. Rakyat Indonesia kecewa dan memberontak terhadap pemerintah Jepang.

Tahun 1944 Jepang mulai terdesak oleh tentara Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda) yang melakukan pembalasan. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari janjinya tersebut pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Cosakai. Sesuai dengan namanya tugas BPUPKI adalah menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka.

Berapa jumlah anggota BPUPKI? Saat dilantik oleh Jepang pada 28 Mei 1945 BPUPKI berjumlah 62 orang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.Panji Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi.

Sidang resmi pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua pada 10-17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Diantara masa persidangan pertama dan kedua tersebut BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi

yaitu sidang yang dilaksanakan pada masa reses (masa istirahat dari kegiatan persidangan). Jadi meskipun seharusnya istirahat tetapi para tokoh pendiri negara tetap bekerja keras dengan bersidang untuk membahas usul-usul rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pada masa reses ini dihadiri tiga puluh delapan (38) orang, dipimpin olehanggota BPUPKI yaitu Ir.Soekarno.

B. Usulan Dasar Negara oleh Para Pendiri Negara



sumber: Memory of Netherlands

Dr. Radjiman

Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum negara berdiri.

Ketua BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pidato pada awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Selanjutnya dalam sidang pertama BPUPKI para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya. Beberapa diantaranya mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun rumusan dasar negara yang diusulkan berbeda-beda, namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan isi materi maupun semangat yang menjiwai rumusan-rumusan tersebut.

Usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) secara berurutan disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.



sumber: tirto.id

Mr. Muhammad Yamin

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada sidang pertama 29 Mei 1945 saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia, Mr. Muhammad Yamin mengatakan bahwa: "...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur." Selanjutnya dikatakan pula "...kita tidak berniat laluakan meniru sesuatu susunan tatanegara negeri luaran..." (*Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 1998:15*).

Mr.Muhammad Yamin mengusulkan limadasarnegara Indone-

sia merdeka secara lisan dan tertulis. Usulan secara lisan yang disampaikan ketika berpidato, berbeda dengan usulan yang tertulis. Berikut adalah rumusan dasar negara yang disampaikan secara lisan ketika berpidato dan yang disampaikan secara tertulis.

Usulan Secara Lisan	Usulan Tertulis
1. Peri Kebangsaan	1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan	2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Peri Ketuhanan	3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Peri Kerakyatan	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Kesejahteraan Sosial	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mr.Soepomo (31 Mei 1945)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang disampaikan oleh Mr. Soepomo adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat



sumber: brainly.co.id

Mr. Soepomo

Dalam pidatonya Mr. Soepomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat, yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, bukan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau golongan yang paling kuat.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidato tersebut diusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial



sumber: erepublik.com

Ir. Soekarno

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk lima dasar negara tersebut Ir. Soekarno juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Panca artinya lima, sila artinya asas atau dasar, di atas kelima dasar itulah Negara Indonesia berdiri. Ir. Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau, tetapi tidak disebutkan siapa kawan tersebut. Usul mengenai nama Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya yaitu sidang kedua. Panitia kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno ini beranggotakan delapan orang, yaitu (1) Ir. Soekarno, (2) Ki Bagoes Hadikoesoemo, (3) Kyai Haji Wachid Hasjim, (4) Mr. Muhammad Yamin, (5) Sutardjo Kartohadikoesoemo, (6) A.A Maramis, (7) Otto Iskandardinata, dan (8) Drs. Mohammad Hatta.

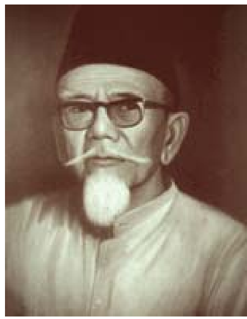
Panitia kecil tersebut selanjutnya mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang terkait dengan persiapan Indonesia Merdeka. Usul-usul yang masuk dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
2. Usul mengenai dasar;
3. Usul mengenai soal unifikasi dan federasi;
4. Usul mengenai bentuk negara dan kepala negara;
5. Usul mengenai warga negara;
6. Usulmengenaidaerah;
7. Usul mengenai soal agama dan negara;
8. Usul mengenai pembelaan, dan
9. Usul mengenai soal keuangan. (*Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,1998:110*)

Sesudah sidang, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Dalam rapat tersebut dibentuk satu panitia kecil lagi yang kemudian disebut panitia sembilan. Tugas panitia sembilan ini adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.

Siapa saja anggota panitia sembilan yang bertugas menyelidiki usul-usul tentang perumusan dasar negara tersebut? Anggota panitia sembilan adalah: (1) Ir. Soekarno (Ketua), (2) Mohammad Hatta, (3) Muhammad Yamin, (4) A.A Maramis, (5) Mr. Achmad Soebardjo (Golongan Kebangsaan), (6) Kyai Haji Wahid Hasjim, (7) Kyai Haji Kahar Moezakir, (8) Haji Agoes Salim,dan (9) R. Abikusno Tjokrosoejoso (Golongan Islam).


Mr. Achmad Soebardjo


Haji Agoes Salim


Ir. Soekarno


Mohammad Hatta


A.A Maramis


KH Kahar Moezakir


R. Abikusno Tjokrosoejoso


Muhammad Yamin


KH Wahid Hasjim

sumber: wikivividly.com

Gambar 2. Anggota panitia sembilan

C. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Panitia Sembilan mengadakan rapat dirumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama masalah agama dan negara. Setelah rapat yang cukup alot, pada 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan undang-Undang dasar. Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan undang-undang dasar tersebut dinamakan ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”. Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota panitia sembilan itu kemudian terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”

Di dalam naskah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, “Mukadimah” atau “Piagam Jakarta” tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bunyi lengkap naskah Mukadimah atau pembukaan hukum dasar tersebut adalah sebagai berikut.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

(*Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.1998:407*)

Selanjutnya naskah "Piagam Jakarta" tersebut akan dibawa ke Sidang kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945. Panitia sembilan berkeyakinan bahwa "Mukadimah" dapat menghubungkan dan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Pada 14 Juli 1945 dalam sidang kedua BPUPKI rancangan pembukaan undang-undang dasar yaitu Mukadimah atau Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI.

PENUGASAN

Telaah Perumusan Dasar Negara

Setelah mempelajari materi Unit 1.1 selanjutnya coba Anda telaah proses perumusan dasar negara dengan menelaah panitia kecil dan tugasnya, Panitia sembilan dan tugasnya, serta membandingkan usulan-usulan dasar negara dari para tokoh pendiri negara.

1. **Tujuan:**
   a. Anda akan lebih memahami proses perumusan dasar negara Pancasila.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1.1
   b. Bacalah penugasan di lembar Kerja (LK)
   c. Isilah LK dengan membaca uraian materi yang sesuai dengan penugasan
   d. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   e. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   f. Mintalah konfirmasi tutor atas jawaban Anda.
   g. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-1)

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian
1	Anggota Panitia Kecil	Tulis siapa saja anggota Panitia Kecil, misal: 1. Ir. Soekarno 2. ...... 3. ...... 4. dst
2	Tugas Panitia Kecil	
3	Anggota Panitia Sembilan	
4	Tugas Panitia Sembilan	
5	Persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara	
6	Perbedaan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara	

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Pepatah "Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya" menggambarkan kondisi bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Pada tahun 1942 Indonesia lepas dari penjajahan Belanda ganti dijajah oleh ...

   a. Jepang b. Sekutu c. Inggris d. Amerika Serikat

2. Penderitaan bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh peraturan tentara Jepang di masa penjajahan adalah ...

   a. Kerja rodi b. Tanam paksa c. Kerja paksa d. Romusha

3. Ketika mulai terdesak oleh sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda), Jepang berusaha mengambil hati bangsa Indonesia dengan ...

   a. Memerintahkan BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan
   b. Menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
   c. Mendesak tokoh-tokoh bangsa Indonesia agar segera bersidang
   d. Meminta agar BPUPKI menyusun rancangan dasar negara

4. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan beberapa orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI tersebut ialah ...

   a. dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat b. Ir. Soekarno c. Moh Yamin d. Drs. Moh.Hatta

5. Tugas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ialah ...

   a. Menyiapkan dan mengesahkan Pancasila Dasar Negara
   b. Membuat rancangan undang-undang dasar Negara RI
   c. Mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden RI
   d. Mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan

6. Sidang BPUPKI yang menghasilkan rancangan dasar negara adalah sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal ...

   a. 29 April - 1 Mei 1945 b. 28 Mei - 1 Juni 1945
   c. 29 Mei - 1 Juni 1945 d. 10 Juli - 17 Juli 1945

7. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini!
   1. Persatuan
   2. Kekeluargaan
   3. Keseimbangan lahir dan batin
   4. Musyawarah
   5. Keadilan rakyat

   Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh ...

   a. Ir. Soekarno b. Mr. Moh Yamin c. Mr. Soepomo d. Drs. Mohammad Hatta

8. Perhatikan rumusan rancangan dasar negara berikut ini!
   1. Kebangsaan Indonesia
   2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
   3. Mufakat atau demokrasi
   4. Kesejahteraan sosial
   5. Ketuhanan yang berkebudayaan

   Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh ...

   a. Ir. Soekarno b. Mr. Moh Yamin c. Mr. Soepomo d. Drs. Mohammad Hatta

9. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini!
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Kebangsaan persatuan Indonesia
   3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
   4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

   Rumusan tersebut adalah rumusan yang diusulkan oleh ...

   a. Ir. Soekarno b. Mr. Moh Yamin c. Mr. Soepomo d. Drs. Mohammad Hatta

10. Tokoh yang mengemukakan pemikirannya tentang nama Pancasila untuk dasar negara Indonesia ialah ...

    a. Drs. Moh. Hatta b. Ir. Soekarno c. Mr. Moh Yamin d. R. Abikusno Tjokrosoejoso

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Apakah semboyan yang dipromosikan Jepang untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang? Jelaskan!
2. Berapa kali BPUPKI mengadakan persidangan, dan kapan?
3. Apa hasil-hasil sidang BPUPKI?
4. Mengapa dasar negara harus disusun sekuat mungkin?
5. Nilai-nilai apakah yang tercermin dalam sikap para tokoh ketika berlangsungnya proses perumusan/penetapan dasar negara yang dapat kita teladani?

UNIT 2 MENGUKUHKAN PANCASILA

Perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang tercermin dalam gambar? Adakah nilai-nilai Pancasila tercermin dalam aktivitas pada gambar tersebut? Ya! Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah ciri khas bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mufakat merupakan satu diantara nilai-nilai Pancasila yang berakar dalamkehidupan sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Musyawarah untuk mencapai mufakat juga tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari proses perumusan dasar negara, kita telah belajar bahwa para pendiri negara selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Para pendiri negara selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Bagaimana dengan proses penetapan dasar negara? Bagaimana pula dengan kehidupan pada masa sekarang? Apakah musyawarah untuk mufakat masih melekat dengan kuat?





sumber: tirto.co.id/GiriArmyNews

Gambar 3. Sidang PPKI. Musyawarah-mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kiri) dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam masyarakat (kanan)

Setelah mempelajari peristiwa sejarah tentang proses perumusan dasar negara dalam persidangan BPUPKI sampai dihasilkannya naskah Piagam Jakarta pada Unit 1.1, sekarang Anda akan melanjutkan pembelajaran tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Bagaimana dinamika proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, apakah juga dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat? Kapan, dan oleh siapa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan? Nilai-nilai apa yang tercermin dalam sikap para tokoh pendiri negara dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Anda akan menemukan jawabannya setelah mempelajari dan mengikuti aktivitas penugasan dalam Unit 1.2 berikut ini.

A. Pembentukan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Kapan BPUPKI dibubarkan? Sesudah menyelesaikan tugasnya dalam persidangan kedua yang berlangsung dari tanggal 10-16 Juli 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya pada 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai.

Pada 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan. Dalam pertemuan tersebut Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya.

Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itu terjadilah kekosongan pemerintahan di Indonesia. Inggris yang diserahi tugas oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia termasuk Indonesia, belum datang. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan karena pemberian Jepang tetapi atas hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri tanpa persetujuan Jepang PPKI yang awalnya beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, ditambah enam orang sehingga menjadi 27 orang yang semuanya berasal dari bangsa Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dibentuk oleh Jepang, PPKI tidak tunduk dan bekerja untuk kepentingan Jepang. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi. PPKI juga bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. PPKI merupakan suatu badan yang mencermikan perwakilan rakyat Indonesia.

B. Penetapan Pancasila

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara merdeka yang baru saja berdiri tentu harus memiliki alat-alat perlengkapan negara. Oleh karena itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang.

Dalam sidangnya pada 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sering disingkat dengan sebutan UUD 1945. Hasil sidang PPKI adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.



sumber: dok IPPHOS

Gambar 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan PPKI tersebut terdiri atas dua bagian yaitu bagian "Pembukaan" dan bagian "Batang Tubuh" atau pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas empat alinea.

Pada alinea ke-4 tercantum rumusan dasar negara Pancasila yang berbunyi sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian secara resmi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia ialah pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam naskah "Piagam Jakarta" mengalami perubahan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara yang berubah adalah sila pertama yang semula berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Mohammad Hatta, latar belakang perubahan sila pertama tersebut bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan laut Jepang) yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengankewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia bagian Timur tersebut Drs. Mohammad Hatta bersama K.H.A Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. H.Teuku Mohammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimedjo, mengadakan rapat menjelang pembukaan rapat pertama PPKI. Demi persatuan dan kesatuan nasional, agar bangsa Indonesia tidak terpecah, para tokoh pendiri negara yang bermusyawarah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. (*Sumber: Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.1998:533.SB*).

PENUGASAN

Menganalisis rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Setelah mempelajari Materi Unit 1.2 silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan tugas menganalisis rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta dan rumusan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta apa latar belakang perubahan rumusan tersebut dengan mengerjakan LK-2 berikut ini.

1. **Tujuan**
   a. Anda akan lebih memahami proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1.2
   b. Baca dan isi LK sesuai dengan materi yang dibahas
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
   f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

Rumusan Sila-Sila Pancasila dalam
Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Rumusan Pancasila dalam Naskah Piagam Jakarta	Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Tulis rumusan dalam Piagam Jakarta	Tulis rumusan dalam Pembukaan UUD 1945

Apa latar belakang perubahan rumusan dasar negara tersebut?
....
....
....
....
....
....

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Panitia Persaipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal ...
   a. 7 Agustus 1945
   b. 8 Agustus 1945
   c. 14 Agustus 1945
   d. 17 Agustus 1945
2. Jendral Jepang yang ditemui oleh para pendiri negara di Saigon dalam pembentukan PPKI ialah ...
   a. Mallaby
   b. Hirohito
   c. Chuo Sangi In
   d. Terauchi
3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga dikenal dengan sebutan ...
   a. Dokuritsu Zyunbi Iinkai
   b. Dokuritsu Zyunbi Cosakai
   c. Panitia Perancang Dasar Negara
   d. Panitia Kecil Perancang hukum dasar
4. Siapakah Ketua dan Wakil Ketua PPKI?
   a. Ir. Soekarno dan Mr. Moh. Yamin
   b. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta
   c. Ir. Soekarno dan Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat
   d. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dan Mr. Moh. Yamin
5. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Inggris belum datang ke Indonesia sehingga pada saat itu terjadilah ...
   a. Proklamasi Kemerdekaan
   b. Perebutan kekuasaan
   c. Penulisan teks Proklamasi
   d. Kekosongan pemerintahan
6. Bukti bahwa PPKI tidak tunduk dan bekerja untuk kepentingan Jepang antara lain adalah ...
   a. Dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri
   b. Bersidang saat Jepang masih berkuasa
   c. Menambah anggota tanpa persetujuan Jepang
   d. Menyiapkan kemerdekaan atas perintah Jepang

7. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan suatu badan yang ...
   a. Bertugas untuk menyusun dasar negara
   b. Anggotanya mencerminkan rakyat Indonesia
   c. Dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum
   d. Anggotanya campuran orang Indonesia dan Jepang
8. Perubahan rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta sebelum sidang PPKI dilakukan berdasarkan hasil ...
   a. Pemungutan suara
   b. Putusan pemimpin sidang
   c. Musyawarah mufakat
   d. Permintaan tentara Jepang
9. Kesepakatan para pendiri negara untuk mengubah rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah demi ...
   a. Kelancaran sidang BPUPKI
   b. Menjaga keutuhan bangsa Indonesia
   c. Menyenangkan hati Mr. Mohammad Yamin
   d. Kepentingan masyarakat Indonesia bagian Timur
10. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea. . . .
   a. Pertama   b. Kedua   c. Ketiga   d. Keempat

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Kapan Sidang PPKI diselenggarakan dan siapa yang memimpin?
2. Siapa saja tokoh pendiri negara yang bermusyawarah menjelang sidang PPKI? Sebutkan lima tokoh.
3. Nilai-nilai apa yang tercermin dalam sikap para pendiri negara ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Sebutkan minimal tiga nilai.
4. Apakah hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945?
5. Naskah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terdiri atas dua bagian. Apa saja?

UNIT 3 KETELADANAN *FOUNDING FATHERS*

Perhatikan gambar berikut. Dua orang dalam gambar adalah tokoh yang mendapatkan penghargaan karena keberhasilan dan karyanya dalam bidang masing-masing yang memberikan inspirasi serta manfaat bagi banyak orang.



sumber: solopos.com

Gambar 5. Sadiman pelestari lingkungan dari Kabupaten Wonogiri

Sadiman atau yang akrab disapa Mbah Sadiman, warga Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan *Kick Andy Heroes Award 2016*, atas aksi penghijauannya di bukit seluas 100 hektare, seorang diri. Tanpa meminta upah, Mbah Sadiman melakukan reboisasi di hutan milik Perhutani di bukit Gendol dan Ampyangan selama 20 tahun. Mbah Sadiman ingin mengembalikan suasana yang sejuk, cukup air. Langkah Mbah Sadiman sudah dinikmati warga sekitar. Salah satunya air dari pegunungan disalurkan ke rumah-rumah warga.



sumber: liputan6.com

Gambar 6. Undang Suryaman, merelakan rumahnya yang minimalis untuk dijadikan sekolah

Undang Suryaman, juru parkir tamatan SD yang tinggal di Desa Babakan Loa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendirikan sekolah gratis untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur yaitu agar anak-anak tidak mengalami nasib seperti dirinya yang putus sekolah karena terhalang biaya. Atas karya dan pengabdiannya tersebut ia mendapatkan penghargaan *Kick Andy Heroes Award 2017*.

Mbah Sadiman dan Undang Suryaman adalah contoh warga negara Indonesia yang memiliki komitmen dan semangat kebangsaan sebagaimana diteladankan oleh para tokoh pendiri negara atau yang dikenal dengan istilah *Founding Fathers*. Mereka memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita, rela berkorban demi kepentingan banyak orang, dan melakukan pekerjaannya dengan ikhlas tanpa mengharap upah (tanpa pamrih). Sikap dan tindakan semacam inilah yang dinamakan *Hero's* atau kepahlawanan dan patriotisme.

A. Semangat dan Komitmen Para Pendiri Negara

The Founding Fathers adalah julukan untuk para tokoh pendiri negara. Tokohyang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Ir. Soekar-

no, Drs. Moh.Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo, Agus Salim, dan banyak lagi yang lainnya. Para tokoh pendiri negara tersebut memilikisemangatyangkuat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Rasa cinta dan semangat kebangsaan yang begitu kuat, disertai kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara yang ditunjukkan para tokoh pendiri negara maupun segenap rakyat Indonesia membuahkan hasil gemilang yaitu Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia sebagaimana yang diteladankan oleh para pendiri negara tersebut harus terus dipupuk dan dikobarkan dalam diri setiap warga negara Indonesia.

Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan dipertahankan. Seseorang yang memiliki semangat kebangsaaan akan merasa bangga sebagai warga negara Indonesia.

Kebanggaan sebagai warga negara dan bangsa Indonesia dapat kita rasakan, misalnya: ketika menyaksikan bendera merah putih berkibar dengan megahnya. Kita juga bangga ketika bendera merah putih berjajar dengan bendera negara-negara lain di dunia dalam acara-acara internasional. Demikian pula ketika bendera merah putih berkibar dan lagu *Indonesia Raya* berkumandang dalam kejuaraan olahraga antar negara.



sumber: www.goodnewsfromindonesia.id

Gambar 7. Berkibarlah Benderaku

Semangat kebangsaan disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya Tanah Air. Patriot artinya seseorang yang mencintai Tanah Air. Patriotisme adalah sikap kepahlawanan. Sikap yang berani, pantang menyerah, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa dan tanah airnya, adalah seseorang yang memiliki jiwa dan sikap patriotisme.



B. Komitmen Terhadap Pancasila

Komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian komitmen juga berarti janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Kita dapat meneladani semangat dan komitmen kebangsaaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat dan komitmen kebangsaan yang diteladankan oleh para pendiri negara kita tersebut antara lain adalah:

a. Mengutamakan persatuan, kesatuan dan nasionalisme.
b. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
c. Selalu bersemangat dalam berjuang.
d. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa
e. Melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lebih luas bangsa dan negara.

Sebagai warga negara Indonesia kita juga harus memiliki semangat dan komitmen kebangsaan sebagaimana diteladankan oleh para pendiri negara. Diantaranya adalah dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila seperti: (1) taat menjalankan ibadah dan menghormati pemeluk agama lain; (2) menghormati hak-hak orang lain; (3) menjaga kerukunan hidup, persatuan dan kesatuan; (4) menjaga kelestarian lingkungan; (5) suka menolong sesama, dan sebagainya.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi kesepakatan (konsensus) nasional. Merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dipandang sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Anggota-anggota PPKI berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat membentuk sebuah negara dengan dasar Pancasila.

PENUGASAN

Mengenal Tokoh Pendiri Negara dan Keteladannya

Setelah mempelajari Materi Unit 1.3 tentang semangat dan komitmen para tokoh pendiri negara, Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan mengumpulkan minimal tiga (3) gambar atau foto para pendiri negara dilengkapi dengan nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaannya. Kemudian temukan contoh tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan komitmen kebangsaan tersebut dalam kehidupan masyarakat di masa sekarang.

1. Tujuan

a. Lebih mengenal para pendiri negara dan teladan yang diberikannya.
b. Memiliki semangat dan komitmen kebangsaan untuk menjaga, serta mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Langkah-langkah Kegiatan

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1.3
b. Baca dan isi LK sesuai dengan materi yang dibahas
c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-3)

No	Gambar/Foto dan Nama Tokoh Pendiri Negara	Nilai-nilai Semangat dan Komitmen
1	Contoh: Ir. Soekarno	• Jiwa dan semangat untuk merdeka • Nasionlisme • Patriotisme • Rela berkorban • Tanggungjawab • Dst

<table>
<tr><td>2</td><td>.....................</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>.....................</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>.....................</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Contoh-contoh tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan semangat kebangsaan di masa sekarang.
a. Contoh: Pejuang Lingkungan (Sadiman) ....
b. ....
c. ....
d. dst</td></tr>
</table>



MARI INGAT KEMBALI

1. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 oleh Jepang karena Jepang terdesak oleh Sekutu.
2. Sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai 29 Mei-1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara.
3. Tokoh pendiri negara yang mengusulkan rancangan dasar negara ialah Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
4. Pada sidang 1 Juni 1945 Ir.Soekarno mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka dinamakan Pancasila.
5. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia Kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan. 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Mukadimah yang akan dibawa dalam sidang kedua BPUPKI.
6. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai 10-16 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Pada sidang 14 Juli 1945 BPUPKI menyepakati rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta.
7. Setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. PPKI bersidang pertama kali sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu 18 Agustus 1945.
8. Sidang PPKI menghasilkan keputusan: (1) menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta; (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
9. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan.
10. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudahfinal. Karena telah menjadi kesepakatan nasional (konsensus nasional) yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 2 : Taat Norma, Ketertiban Tercipta

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

ttd

Harris Iskandar

Daftar Isi



TAAT NORMA, KETERTIBAN TERCIPTA



Pengantar Modul

Pernahkah Anda mendengar peribahasa “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Apa artinya? Peribahasa ini mengandung arti setiap negeri atau bangsa berlainan adat kebiasaannya. Tiap-tiap daerah ada adat istiadatnya sendiri. Jadi aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah yang lain. Bagaimana dengan peribahasa “Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” Tahukah Anda apa artinya? Artinya kita wajib menghormati adat istiadat dan kebiasaan di tempat dimanapun kita berada. Dengan demikian maka ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan kesejahteraan kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat akan tercipta.

Sebagai warga masyarakat di lingkungan daerah tempat tinggal kita, tentu kita wajib mengetahui dan mematuhi norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu mari kita pelajari Modul 2 bertema “Taat Norma, Ketertiban Tercipta” ini. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa



sumber: www.toyotaindonesiamanufacturing.co.id

Gambar 1. Tertib dalam menyeberang jalan

modul dua ini diuraikan dalam tiga unit yaitu Unit 1 “Ayo Patuhi Norma”, Unit 2 “Untuk Adil Harus Tertib”, dan Unit 3 “Aku Taat pada Norma”. Meskipun demikian ketiga unit tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling terkait satu sama lain. Diawali dengan konsep-konsep tentang norma dan macam-macamnya (unit 1), kemudian analisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan (unit 2), serta penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari (unit 3).

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 2 dengan tema “Taat Norma, Ketertiban Tercipta” ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Taat Norma Ketertiban Tercipta		
UNIT 1 **Ayo Patuhi Norma**	**UNIT 2** **Untuk Adil Harus Tertib**	**UNIT 3** **Aku Taat Pada Norma**
Materi : • Pengertian norma • Macam-macam norma • Makna simbol gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila **Penugasan :** • Membandingkan berbagai macam norma yang berlaku dalam masyarakat	**Materi :** Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan **Penugasan :** Mengamati pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat	**Materi :** Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari **Penugasan :** Mengidentifikasi aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 1 “**Ayo Patuhi Norma”**, memuat uraian tentang pengertian norma, dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Unit 2 “**Untuk Adil Harus Tertib**”, memuat uraian tentang pengertian adil, serta arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Sedangkan Unit 3 “**Aku Taat pada Norma**”, menguraikan contoh-contoh perilaku taat norma, serta permasalahan yang terkait dengan pelanggaran norma-norma masyarakat. Modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang telah dipelajari.

Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh

karena itu dalam mempelajari modul sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian aktivitas penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Menghormati teman yang berbeda agama maupun tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menunjukkan sikap disiplin dengan mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran secara tertib.
3. Menjelaskan pengertian norma
4. Menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat.
5. Menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
6. Mengampanyekan perilaku taat norma dalam kehidupan masyarakat di lingkungan daerah.

UNIT 1 AYO PATUHI NORMA





sumber: kaskus.co.id/www.sumbarprov.go.id

Gambar 2. Tertib lalu lintas (kiri) dan ketidaktertiban berlalu lintas (kanan)

Coba Anda perhatikan gambar di atas. Perilaku pengguna jalan manakah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat? Norma apa yang tercermin dalam gambar tersebut?

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita wajib menaati aturan atau norma-norma yang berlaku agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, tenteram, dan sejahtera. Apakah pengertian norma, dan apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Uraian pada unit 2.1 berikut ini akan membantu Anda lebih memahami tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan.

A. Pengertian Norma

Pernahkah Anda mendengar kata *zoon politicon* apa artinya? Aristoteles seorang ahli filsafat dari Yunani mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia adalah mahluk sosial. Mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Menurut kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai mahluk individu sekaligus mahluk sosial. Mahluk individu karena manusia diciptakan dengan karakteristik masing-masing, memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagai individu manusia memiliki sifat, bakat, minat, pemikiran,

dan kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai mahluk sosial manusia sama-sama membutuhkan orang lain dalam hidupnya, karena itu manusia tergabung dalam kelompok masyarakat.



sumber: nationalgeographic.grid.id

Gambar 3. Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan

Kehidupan kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat bermacam-macam orang dengan sifat, karakter, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda-beda, dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan, perselisihan, perpecahan, bahkan dapat pula mengarah pada terjadinya kekacauan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kaidah, norma atau aturan yang disepakati bersama agar terwujud kehidupan yang tertib dan teratur. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat.

B. Macam-macam Norma

Ada berbagai macam norma dalam masyarakat yang wajib kita patuhi agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, dan tenteram. Macam-macam norma berlaku dalam masyarakat yaitu norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Bermacam-macam norma dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling melengkapi dan saling menguatkan dalam mewujudkan keadilan.

a. Norma Agama

Perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa yang terlihat? Orang-orang yang sedang beribadah menurut tata cara dan ajaran agamanya masing-masing. Mengapa kita beribadah? Apa akibatnya jika seseorang tidak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya? Dosa! Itulah norma agama, aturan dalam agama.

Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama ialah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma Agama merupakan tuntunan hidup kearah jalan yang benar. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.Contoh pelaksanaan norma agama yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama sanksinya adalah dosa.













sumber: lubuklinggaukota.go.id/www.bosnewslife.com/www.balishanti.id/kristagracia.sch.id/www.youtube.com/www.theguardian.com

Gambar 4. (a) Ibadah Agama Islam, (b) Ibadah Agama Katolik, (c) Ibadah Agama Hindu, (d) Ibadah Agama Kristen, (e) Ibadah Agama Khonghucu, dan (f) Ibadah Agama Budha

Norma agama tidak hanya mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan. Peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dan memberi perlindungan terhadap kepentingan diri, maupun harta bendanya. Berikut ini adalah contoh norma agama.

a. Melaksanakan ketentuan agama, seperti: membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah.

b. Menjauhi larangan agama, seperti: melakukan perjudian, minuman-minuman keras, mencuri, berbuat fitnah, membunuh, berbuat zina, berbuat riba;
c. Melaksanakan shalat/sembahyang, ibadah tepat pada waktunya.

Norma agama bagi pemeluk Agama Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen dan Katolik berpegang pada Alkitab. Umat Hindu berpegang pada Kitab Veda, umat Budha berpegang pada Kitab Tripitaka. Kitan suci Agama Khonghucu adalah Wu Jing (Kitab Suci yang Lima), Si Shu (Kitab yang Empat), dan Xiao Jing (Kitab Bakti).

Sebagai makhluk ciptaan-Nya yang sempurna, manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat memanfaatkan alam, tetapi sekaligus bertanggungjawab untuk memelihara dan melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma-norma agama, akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keserasian antara manusia dengan sesama maupun lingkungannya.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ketika seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbu, ada suara hati nurani, suara kebenaran yang memperingatkannya. Jika ia mendengar dan mengikuti bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya, maka ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak benar, tindakan yang melanggar norma.

Sebaliknya jika ia tetap melakukan tindakan yang tidak jujur, tindakan yang melanggar norma, berarti ia telah mengabaikan suara hatinya, suara kebenaran yang memperingatkannya. Suara hati nurani adalah suara kebenaran yang senantiasa memperingatkan kita untuk bertindak benar, bertindak jujur sesuai norma-norma yang berlaku.

Karena berasal dari hati nurani, atau bisikan kalbu, maka seseorang yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, yaitu tidak mendengarkan suara hati nuraninya, akan timbul rasa penyesalan. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan (misalnya tidak jujur), adalah penyesalan karena perbuatannya tersebut.

Contoh norma kesusilaan antara lain adalah berikut ini.

a. Hendaklah engkau bertutur kata dan bertindak jujur.
b. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia
c. Janganlah engkau menyakiti perasaan sesamamu/
d. Janganlah membunuh sesamamu.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan,


sumber: www.nu.or.id

Gambar 5. Kesopanan

yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama, tentang hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas, sopan dan yang tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal (berlaku setempat), tidak berlaku umum untuk seluruh dunia.

Oleh karena itu ada kemungkinan suatu tindakan tertentu dipandang pantas dalam suatu kelompok masyarakat, namun dianggap kurang pantas atau kurang sopan dalam lingkungan masyarakat yang lain. Hal ini sesuai dengan peribahasa “Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya”. Norma kesopanan yang memuat aturan tentang pergaulan manusia dalam masyarakat tersebut, terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku, tata cara bertamu, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya.

Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan adalah tidak disukai, dicela atau dicemooh oleh masyarakat, bahkan bisa juga dikucilkan.

Contoh norma kesopanan antara lain:

(1) Mengucapkan salam ketika bertamu.
(2) Mencium tangan orang tua saat berpamitan.
(3) Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
(4) Berpakaian sopan.
(5) Bertutur kata sopan.
(6) Tidak berbicara sambil mengunyah makanan.
(7) Tidak meludah di sembarang tempat.
(8) Tidak menyela pembicaraan orang.

Samakah norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat?

Kebiasaan menunjukkan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama dan dalam waktu yang lama. Tindakan atau kebiasaan tersebut kemudian

diterima dan diakui oleh masyarakat. Contohnya kebiasaan mengunjungi orang yang lebih tua, mudik lebaran, menjenguk tetangga yang sedang sakit, dsb. Sedangkan adat istiadat adalah aturan dalam masyarakat yang berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik dan dilakukan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan hidup dalam masyarakat. Adat istiadat yang mengandung sanksi disebut hukum adat. Contohnya hukum adat Papua bagi seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, ia harus memberi ganti kerugian dengan uang dan ternak babi.

Adat istiadat yang tidak mengandung sanksi biasa disebut tradisi. Contohnya adat istiadat atau tradisi "mitoni" dalam masyarakat Jawa Tengah yaitu acara tujuh bulanan bagi seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan. Jika seseorang tidak melakukan acara "mitoni" ketika hamil tujuh bulan, maka tidak ada sanksi hukuman yang dikenakan kepadanya. Pulang kampung saat Idul Fitri adalah kebiasaan atau tradisi, jika seseorang tidak pulang kampung pada saat Idul Fitri, maka sanksi dari masyarakat tidak seperti jika seseorang melanggar aturan adat perkawinan.

Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan antara kebiasaan dengan adat istiadat, terletak pada sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat atau hukum adat, lebih kuat dibanding sanksi pelanggaran terhadap kebiasaan.

Tiga macam norma tersebut di atas yaitu norma agama, kesusilaan, dan kesopanan bertujuan membangun ketertiban kehidupan manusia. Namun ketiga norma tersebut belum cukup



sumber: woodscribdindo.blogspot.com

Gambar 6. Tradisi Longkangan di Kec.Munjungan, Kab.Trenggalek, JawaTimur.

kuat memberikan jaminan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ada hal-hal yang tidak termasuk diatur dalam ketiga norma tersebut. Misalnya tentang lalu lintas di jalan raya. Seseorang yang mengendarai motor di jalan raya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengenakan helm. Dalam hal ketenagakerjaan, seorang pekerja dengan masa kerja tertentu berhak mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), dsb.

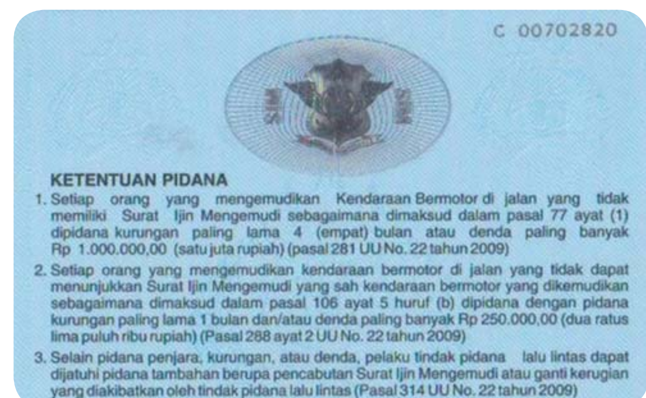
Banyak hal yang tidak diatur dalam ketiga norma tersebut, tetapi sebenarnya perlu diatur agar terwujud ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran norma agama (dosa) diancam hukuman dari Tuhan, yang berlaku kelak di akhirat. Pelanggaran norma kesusilaan mengaikabtkan perasaan cemas, dan penyesalan, bagi pelaku yang insyaf. Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan celaan, cemoohan, atau pengucilan dari lingkungan masyarakat.

Hukuman-hukuman tersebut tidak akan diperhatikan atau diabaikan oleh orang-orang yang memang tidak mempedulikan agama, kesusilaan, dan kesopanan. Orang-orang yang demikian itu merasa tidak terikat oleh norma-norma agama, kesusilaan, maupun kesopanan. Sehingga mereka merasa bebas berbuat sesuka hatinya. Hal ini tentu membahayakan masyarakat. Oleh karena itu disamping ketiga macam norma tersebut yaitu norma agama, kesusilaan dan kesopanan, diperlukan juga norma hukum.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, melalui badan-badan resmi negara yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar maka akan dikenai sanksi oleh negara. Norma hukum berisi larangan-larangan, dan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Perhatikan gambar berikut.





sumber: kaskus.co.id

Gambar 7. Norma hukum lalulintas

Contoh norma hukum:

(1) Bersifat perintah: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77

ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

(2) Bersifat larangan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila seseorang melakukan pelanggaran norma hukum, ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian norma-norma hukum harus dijunjung tinggi dan ditaati agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, teratur, aman, dan damai. Norma hukum memiliki sifat memaksa serta sanksi yang jelas dan tegas. Untuk melaksanakan norma-norma hukum, negara memiliki aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang dapat memaksa seseorang agar menaati hukum dan memberi sanksi bagi pelanggar hukum.

PENUGASAN

Telaah Macam-Macam Norma

Setelah mempelajari materi unit 1 tentang pengertian dan macam-macam norma ini selanjutnya untuk menguatkan pemahaman Anda, silakan Anda melakukan telaah dengan membandingkan berbagai macam norma tersebut sehingga menemukan persamaan dan perbedaannya, disamping pengertian, tujuan, dan macam-macam norma.

1. **Tujuan:**
   a. Anda akan lebih memahami berbagai macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal Anda, dan menerapkannya.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang telah tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas

e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-1)

Lengkapi tabel berikut dengan penjelasan dan tuliskan pada kolom uraian

No	Aspek yang Ditelaah	Uraian
1	Pengertian norma	Norma ialah ....
2	Tujuan adanya norma	....
3	Norma Agama	....
4	Norma Kesusilaan	....
5	Norma Kesopanan	....
6	Norma Hukum	....
Kesimpulan: (Tuliskan simpulan yang Anda peroleh tentang persamaan dan perbedaan norma-norma tersebut)		

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d.

1. Aristoteles seorang ahli filsafat dari Yunani menytaakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah "zoon politicon" artinya manusia ...
   a. Mahluk individu dengan berbagai macam kepentingannya
   b. Adalah mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat
   c. Harus dapat hidup bersama-sama dengan kelompoknya sendiri
   d. Hanya dapat hidup bila selalu bersama-sama dengan manusia lainnya
2. Peribahasa *"Di mana bu mi dipijak, disitu langit dijunjung"* yang berasal dari Sumatera Barat mengandung makna bahwa dimanapun kita berada kita harus ...
   a. Mematuhi norma-norma yang berlaku
   b. Mengetahui semua aturan di daerah tersebut
   c. Memperkenalkan adat istiadat daerahnya sendiri
   d. Melaksanakan norma tertentu yang dianggap sesuai
3. Kaidah hidup, aturan, perintah, dan/atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut ...
   a. Adat istiadat
   b. Hukum negara
   c. Norma-norma
   d. Kebiasaan
4. Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah ...
   a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
   b. Menghukum orang yang melanggar norma
   c. Memaksa seseorang untuk bersikap baik
   d. Menghindari adanya perbedaan kepentingan

5. Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain, merupakan perwujudan norma ...

   a. Agama
   b. Kesopanan
   c. Kesusilaan
   d. Hukum

6. Bercanda dengan memanggil teman, menggunakan sebutan tertentu yang dapat menyinggung perasaannya, merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan norma ...

   a. Agama
   b. Kesopanan
   c. Kesusilaan
   d. Hukum

7. Seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap orang lain dapat diancam hukuman penjara, adalah norma ...

   a. Agama
   b. Kesusilaan
   c. Kesopanan
   d. Hukum

8. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain terletak pada sanksinya, yaitu ...

   a. Hukuman yang berat
   b. Berupa hukuman penjara
   c. Bersifat jelas dan tegas
   d. Pengucilan dan pidana

9. Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial, merupakan pelanggaran norma ...

   a. Agama
   b. Hukum
   c. Kesusilaan
   d. Kesopanan

10. Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan . . .

   a. Jaksa
   b. Hakim
   c. Pengacara
   d. Kepolisian

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Apakah arti peribahasa “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya” Jelaskan pendapat Anda.
2. Dimanakah letak perbedaan antara berbagai macam norma yang berlaku dalam masyarakat?
3. Berikan empat (4) contoh norma kesopanan yang terdapat di lingkungan masyarakat daerah Anda.
4. Mengapa kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat?
5. Berikan dua contoh tradisi atau kebiasaan yang sampai saat ini selalu dilakukan oleh masyarakat di daerah Anda.

UNIT 2

UNTUK ADIL HARUS TERTIB



sumber: amawana.com

Gambar 8. Proses persidangan di pengadilan

Perhatikan gambar di atas! Tahukah Anda apa makna lambang timbangan dan proses sidang pengadilan tersebut? Timbangan atau neraca yang setara dalam lambang keadilan tersebut mengandung makna bahwa hukum tidak berat sebelah, hukum tidak pernah memihak, setiap perbuatan akan ditimbang berat/ringannya sebelum palu diketuk, dan hukuman dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat kecil, di hadapan hukum. Semuanya mendapat perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan. Apakah pengertian adil? Bagaimana mewujudkan keadilan? Lembaga negara yang manakah yang memiliki kewenangan untuk mengadili? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan Anda baca uraian materi berikut ini.

A. Negara RI adalah Negara Hukum

Sebagaimana telah Anda pelajari dalam unit 2 modul ini, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma atau aturan yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Aturan-aturan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi terciptanya ketertiban dan

keharmonisan masyarakat. Tanpa adanya norma yang akan terjadi adalah ketidakteraturan, kekacauan, dan tindakan-tindakan anarkhis dalam masyarakat. Karena itu peraturan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Diantara norma-norma tersebut yang memiliki sifat memaksa, sanksinya jelas dan tegas adalah norma hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dipaksa oleh negara untuk menerima sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peran lebih besar karena sifatnya yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara maupun penyelenggara negara untuk mematuhinya.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Dr. Ismail Suny adalah (1) menjunjung hukum, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan (4) dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Indonesia sebagai negara hukum, tentu menerapkan aturan-aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya siapapun yang bersalah, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan kesamaan kedudukan didepan hukum bagi seluruh warga negara tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

B. Alat Penegak Hukum

Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan terwujud jika hukum tidak dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara untuk menegakkan dan memastikan bahwa hukum dijalankan demi mewujudkan keadilan. Alat perlengkapan negara yang bertugas sebagai penegak hukum antara lain adalah kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara.

Kepolisian, adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi juga bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian dilengkapi dengan wewenang melakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk menemukan tersangka dalam suatu perkara pelanggaran hukum dan kejahatan.



Gambar 9. Penegak Hukum.

Jaksa, adalah alat negara yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dengan memperjuangkan hak korban atau pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan tersangka.

Hakim, adalah alat negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengadilan untuk kemudian menetapkan putusan hukuman atau vonis bagi pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Pengacara atau advokad, merupakan bagian dari penegak hukum yang bertugas memperjuangkan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah perkara, baik yang berada pada posisi sebagai tersangka maupun sebagai korban untuk mendapatkan keadilan.

C. Mewujudkan Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya.

Bagaimana cara mewujudkan keadilan? Mewujudkan keadilan merupakan tujuan dari hukum. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Karena itu cara mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah dengan menjaga tetap tegaknya norma hukum.

Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Dan setiap putusan hukuman harus didasarkan atas rasa keadilan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam setiap putusan pengadilan ada “irah-irah” putusan atau kepala kalimat yang mengawali putusan yang dibacakan hakim, bunyi irah-irah tersebut adalah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...” Hal ini mengandung makna bahwa putusan yang diambil adalah putusan yang bijaksana, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh sembarangan harus benar-benar berdasarkan keadilan.

Keadilan dalam masyarakat akan terwujud jika seluruh warganya mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum. Norma hukum memiliki sifat memaksa yaitu wajib dipatuhi. Barang siapa melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelaku pelanggaran dibedakan menurut berat ringannya pelanggaran. Ada sanksi yang berupa teguran atau peringatan, pengurangan hak-hak tertentu, pembatasan kebebasan (penjara), denda, dan sanksi pidana, bahkan sampai pidana mati. Sifat norma hukum yang memaksa, sanksinya jelas dan tegas, serta pelaku pelanggaran segera ditindak oleh aparat penegak hukum, menjadikan norma hukum cenderung lebih ditakuti dibanding norma-norma lain yang berlaku.

Keadilan dalam masyarakat diwujudkan dengan cara melindungi hak-hak warga negara, serta adanya sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggar hukum. Anggota masyarakat yang melanggar hukum harus dikenai hukuman karena perbuatannya yang merugikan dan merampas



sumber: www.pa-mungkid.go.id

Gambar 10. Pengadilan

hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Karena tindakan main hakim sendiri adalah pelanggaran norma hukum.

Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam masyarakat? Sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, tentu kita tidak boleh berdiam diri, tetapi juga tidak boleh main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri jelas merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika kita mengetahui seseorang melakukan pelanggaran hukum, kita wajib melapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Selanjutnya polisi yang akan bertindak menangani kasus pelanggaran hukum tersebut. Tindakan warga masyarakat melaporkan peristiwa pelanggaran hukum maupun kejahatan kepada pihak yang berwajib sangat membantu aparat penegak hukum. Hal ini merupakan bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya menegakkan hukum, dan keadilan. Sebaliknya, jika warga masyarakat acuh tak acuh, tidak peduli terhadap peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya, mengetahui tetapi berdiam diri, maka sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam upaya penegakan hukum, untuk mewujudkan keadilan.

Pemberian hukuman kepada pelaku penggaran atau kejahatan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan yaitu pengadilan. Lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.

PENUGASAN

Mengamati Pelaksanaan Norma Hukum Dalam Masyarakat

Setelah mempelajari unit 2 Anda dapat melanjutkan pembelajaran dengan mengamati pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat di daerah Anda.

a. Amatilah perilaku kepatuhan terhadap norma-norma, khususnya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan daerah Anda.
b. Temukan minimal empat permasalahan nyata tentang perilaku ketidaktaatan terhadap norma hukum di lingkungan daerah Anda.
c. Catatlah permasalahan nyata tersebut dalam Lembar Kerja (LK-2) ini.
d. Berikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. **Tujuan**

   a. Anda menemukan adanya permasalahan terkait pelaksanaan norma-norma yang memiliki arti sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat di daerah Anda.

2. **Langkah-langkah Kegiatan**

   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 2
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang telah tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
   f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

Nama Anda : ....

Aspek yang Diamati	Permasalahan Nyata yang Ditemukan	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah
Pelaksanaan Norma Hukum dalam kehidupan sehari-hari	Banyaknya pelanggaran lalu lintas	Penjagaan Polisi yang diperketat
	....	....
	....	....
	....	....

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d.

1. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara mengandung makna bahwa ...
   a. Norma hukum lebih menitikberatkan pada pertimbangan
   b. Hukum itu tidak berat sebelah, dan tidak pernah memihak
   c. Berat ringannya pelanggaran hukum harus ditimbang dulu
   d. Pemberian hukuman harus berdasarkan kepentingan korban
2. Apabila norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh warga masyarakat maka dampaknya ialah ...
   a. Terjadi kekacauan dan anarkisme
   b. Banyak orang yang akan dipenjara
   c. Tugas kepolisian semakin berat
   d. Anggota masyarakat akan unjuk rasa
3. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah ...
   a. Melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat
   b. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
   c. Memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melanggar
   d. Untuk membuat orang takut sehingga tidak akan merugikan orang lain
4. Norma hukum memilki sifat memaksa artinya ...
   a. Warga masyarakat terpaksa patuh karena takut polisi
   b. Pemberian hukuman diberikan karena terpaksa
   c. Pelanggarnya dapat dipaksa untuk menerima sanksi
   d. Polisi dapat memaksa seseorang untuk patuh atau tidak patuh
5. Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan ...
   a. Jaksa
   b. Hakim
   c. Pengacara
   d. Kepolisian

6. “Negara Indonesia adalah negara hukum” pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...
   a. Pasal 1 ayat (1)
   b. Pasal 1 ayat (2)
   c. Pasal 1 ayat (3)
   d. Pasal 2 ayat (1)
7. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...
   a. Pasal 27 ayat 1
   b. Pasal 27 ayat 2
   c. Pasal 27 ayat 3
   d. Pasal 27 ayat 4
8. Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum. Karena itu jika mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum, yang harus dilakukan ialah ...
   a. Beramai-ramai menghukum pelaku
   b. Melapor kepada yang berwajib
   c. Berdiam diri agar tidak terlibat
   d. Memberitahu orang lain
9. Pemberian hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum diberikan setelah melalui proses ...
   a. Pemeriksaan kepolisian
   b. Pemeriksaan oleh jaksa
   c. Pembelaan oleh pengacara
   d. Persidangan di pengadilan
10. Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud jika seluruh anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berpartisipasi dalam ...
   a. Upaya penegakan hukum
   b. Mengadili suatu perkara
   c. Menghukum pelaku pelanggaran
   d. Penyelidikan yang dilakukan polisi

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa arti pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa artinya?
3. Apa makna yang terkandung dalam "irah-irah" atau kepala kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ..." dalam setiap putusan yang dibacakan oleh hakim?
4. Mengapa diantara berbagai macam norma yang berlaku, norma hukum cenderung lebih dipedulikan (ditakuti) dibanding norma yang lain?
5. Tindakan main hakim sendiri tidak mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Mengapa demikian?
6. Adakah perbuatan main hakim sendiri yang pernah terjadi di daerah Anda? Jika ada kapan, peristiwa apa, dan bagaimana tindak lanjutnya?

UNIT 3 AKU TAAT PADA NORMA

Bacalah cuplikan berita berikut sebelum Anda mempelajari lebih lanjut uraian materi unit 3 ini.

Penerapan Perdana Tilang Elektronik, 20 Warga Bandung Ditilang

BANDUNG – Sebanyak 20 warga Kota Bandung terkena sanksi tilang oleh Satlantas Polrestabes Bandung pada hari pertama penerapan tilang elektronik (e-tilang) dengan *closed circuit television* (CCTV).



KORAN SINDO/Agus

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo (kiri) dan Kasat Lantas AKBP Mariyono memantau CCTV di TMC Satlantas Polrestabes Bandung, Rabu (4/10).

Para pelanggar terekam CCTV yang terpasang di 72 titik lalu lintas di Kota Bandung, antara lain, Jalan Asia Afrika, Surya Sumantri, Pasteur, Pasirkaliki, dan Pajajaran. Ke-20 pelanggar itu tertangkap kamera CCTV saat pemantauan dari pukul 06.00-10.30 WIB.

Dalam penindakan tilang, yang ditindak adalah pengendara, bukan pemilik kendaraannya. Begitu juga jika mobil yang digunakan pelanggar bekas milik orang lain bisa terlacak di Samsat bahwa kendaraan itu dijual ke siapa. "Kalau pelanggar belum datang, akan kami tunggu," ujar Mariyono.

"Masyarakat perlu tahu bahwa penilangan sekarang bisa dilakukan meskipun tidak ada petugas di lokasi. Melalui CCTV pun bisa dan surat tilang diantarkan ke rumah pelaku pelanggaran. Yang perlu dilakukan adalah peningkatan kesadaran dalam berperilaku tertib dan menaati aturan lalu lintas meskipun tidak ada petugas," kata Hendro.

Apa yang Anda pikirkan setelah membaca cuplikan berita tentang Tilang Elektronik tersebut? Mungkin timbul beberapa pertanyaan seperti berikut ini.

1. Apakah e-tilang dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas?
2. Mengapa seseorang melakukan pelanggaran norma?
3. Apa dampaknya jika anggota masyarakat mengabaikan norma-norma yang berlaku?
4. Bagaimana melakukan kampanye untuk mengajak warga masyarakat agar taat pada norma-norma yang berlaku?

Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan tertib, teratur, aman, nyaman, dan harmonis jika anggota-anggota dalam masyarakat tersebut tidak mematuhi norma-norma yang berlaku.

Sebagaimana telah Anda pelajari pada Unit 1 dan Unit 2. di depan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat berbagai macam norma yang harus ditaati agar terwujud keadilan dalam masyarakat. Pada Unit 3 ini Anda akan diajak untuk melakukan refleksi diri (perenungan) apakah selama ini Anda sudah menjadi warga masyarakat yang taat norma. Disamping itu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan daerah tempat tinggal, Anda juga diajak untuk menemukan aturan-aturan (norma) yang tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat di daerah Anda.

A. Kesadaran Pribadi

Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku, seharusnya didasari oleh kesadaran yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, bukan karena paksaan dari luar, seperti takut pada sanksi hukum, atau takut karena ada yang mengawasi yaitu pihak yang berwajib.

Kesadaran hukum masyarakat akan berkembang jika keadilan dalam penerapan hukum diutamakan. Penegakan hukum yang menjamin keadilan, dan kepastian, akan berdampak timbulnya rasa aman, dan terlindunginya hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Warga negara yang baik menyadari pentingnya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat hidup tenang, tenteram, dan bahagia kita harus tertib dan teratur. Supaya tertib dan teratur, diperlukan adanya aturan. Agar aturan-aturan berfungsi dengan baik, harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Kesadaran diri seperti ini menumbuhkan ketaatan terhadap norma-norma.

Kesadaran diri akan arti pentingnya norma, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat, akan mendorong seseorang untuk terbiasa mematuhi norma-norma yang berlaku. Kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini agar tumbuh dan berkembang hingga menjadi budaya, yaitu budaya tertib.

B. Perilaku Taat Norma

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dimuat dalam berita di atas, masih banyak ditemukan perilaku tidak taat terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran untuk taat pada norma-norma dalam kehidupan sehari-hari masih relatif rendah. Rendahnya kesadaran untuk patuh pada norma-norma yang berlaku tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor pribadi dan lingkungan.

a. **Faktor pribadi,** yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter pribadi seseorang (faktor dari dalam diri sendiri) yang belum memiliki kesadaran untuk menaati aturan.
b. **Faktor lingkungan**, yaitu pengaruh dari lingkungan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan karakter taat pada norma. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orangtua, pergaulan dengan teman sebaya yang perilakunya kurang baik, tidak tertib, tidak taat norma, atau bahkan karena tidak adanya keteladanan dari orang tua.

Perhatikan gambar (a) dan (b) berikut. Apa perbedaannya?



A



B

Tentu dengan mudah Anda dapat membedakan antara perilaku taat norma dan perilaku yang tidak sesuai norma-norma. Jika seseorang sejak kecil terbiasa melakukan tindakan yang tidak sesuai norma (walaupun bukan atas kemauannya sendiri), namun ketika tumbuh menjadi remaja, dan kemudian dewasa ia akan memiliki pandangan yang bisa keliru. Bisa terjadi ia memiliki pandangan bahwa “perilaku yang tidak sesuai norma, itu diperbolehkan karena dulu waktu kecil orang tuanya juga melakukan hal yang sama”. Atau ia akan terbiasa untuk tidak menghormati aturan dan norma-norma yang berlaku.

Jika Anda adalah orang tua dari anak-anak, lakukan refleksi diri apakah Anda sudah memberikan teladan yang baik, dengan membina budaya taat norma pada anak-anak Anda, atau sebaliknya. Jika Anda adalah remaja atau orang dewasa, Anda juga harus melakukan refleksi diri, sudahkah Anda berkontribusi dalam mewujudkan keadilan masyarakat dengan taat pada norma-norma, atau Anda cenderung mengabaikan keberadaan norma-norma tersebut.

PENUGASAN

Identifikasi Norma (Aturan) Tidak Tertulis Namun Selalu Dilaksanakan oleh Masyarakat di Daerah

a. Sebagai wujud kepedulian Anda terhadap norma-norma yang berlaku di daerah Anda:
b. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di daerah Anda.
c. Temukan kebiasaan, tradisi, atau aturan-aturan yang tidak tertulis, namun selalu dilaksanakan oleh warga masyarakat di daerah Anda.
d. Catat hasil pengamatan Anda tersebut dalam Lembar Kerja (LK) 3 ini.
e. Laporkan kepada tutor Anda.

1. Tujuan

a. Menemukan kebiasaan, norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis namun terpelihara, dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat daerah.
b. Meningkatkan kesadaran Anda akan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Langkah-langkah Kegiatan

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3
b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
c. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
d. Mintalah konfirmasi tutor atas jawaban Anda.
e. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-3)

Nama Anda : ....

No	Kebiasaan/Tradisi/Norma/Aturan Tidak Tertulis Namun Selalu Dilaksanakan dalam Masyarakat	Makna dan Tujuan
1	Contoh: Tradisi “Sasrahan” dalam sistem perkawinan adat Jawa.	Upacara ini merupakan suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis.
2		
3		



MARI INGAT KEMBALI

1. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis.
3. Ada empat norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat yaitu:
   a. Norma Agama
   b. Norma Kesusilaan
   c. Norma Kesopanan
   d. Norma Hukum
4. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
5. Keadilan adalah memperlakuan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum.
6. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 3 : Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi



MARI MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI



Pengantar Modul

Dalam dunia olahraga seperti sepak bola, futsal, voli, dan sebagainya kita tahu bahwa ada aturan main yang harus ditaati agar permainan berjalan dengan baik, dan menyenangkan. Semua pihak baik yang menang maupun yang kalah akan merasa puas karena pertandingan berlangsung- dengan obyektif (*fair play*). Sebaliknya jika aturan main tidak ditaati, maka akan menimbulkan keributan, bahkan bisa terjadi kekacauan. Pertandingan yang seharusnya menjadi tontonan menarik, berubah menjadi suatu kekacauan.

Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada konstitusi atau undang-undang dasar yang harus ditaati agar pemerintahan negara berjalan dengan baik, sehingga tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud. Sebagai warga negara Indonesia kita perlu mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana kostitusi negara kita yaitu Undang-Undang



sumber: bola.com

Gambar 1. Aturan main dalam Sepak bola

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuat dan disahkan oleh para pendiri negara. Pemahaman tentang konstitusi akan mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran berkonstitusi, kesadaran untuk mematuhi peraturan dan hukum negara.

Untuk itu kita akan mempelajari Modul bertema "Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi" dalam tiga unit yang saling terkait satu sama lain ini. Unit 1. Musyawarah dalam BPUPKI, Unit 2. Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi, dan Unit 3. Mengingat kebaikan-kebaikan Tokoh Pendiri Negara". Ketiga unit tersebut merupakan satu kesatuan. Pada unit pertama kita akan mempelajari pengertian konstitusi atau undang-undang dasar, Panita Perancang UUD, serta proses perumusan UUD Negara RI Tahun 1945. Unit kedua mengajak Anda untuk mempelajari proses dan hasil Sidang PPKI pada18 Agustus 1945, sistematika, dan arti penting UUD Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan unit ketiga, mengajak kita untuk menelaah peran tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945, serta mengingat dan meneladani kebaikan-kebaikan tokoh pendiri negara tersebut.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 3 dengan tema "Mari Membangun Kesadaran Berkostitusi" terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi		
UNIT 1 **Musyawarah Mufakat dalam BPUPKI**	**UNIT 2** **Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi**	**UNIT 3** **Mengingat Kebaikan-kebaikan Tokoh Pendiri Negara**
Materi : • Pengertian Konstitusi • Pantia Perancang UUD • Proses Perumusan UUD Negara RI Th 1945 **Penugasan :** Mengerjakan soal-soal latihan tentang konsep konstitusi	**Materi :** • Sidang PPKI 18 Agustus 1945 • Sitematika UUD Negara RI Tahun 1945 • Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia **Penugasan :** Mengerjakan LK tentang Hasil Sidang PPKI dan Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945	**Materi :** • Peran Tokoh Perumus UUD Negara RI Tahun 1945 **Penugasan :** Membuat tulisan tentang sikap yang dapat diteladani dari tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 1 Musyawarah Mufakat dalam BPUPKI, memuat penjelasan mengenai proses perumusan, dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam persidangan BPUPKI. Unit 2 Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi, memuat uraian tentang arti pentingnya konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia; dan Unit 3 Mengingat Kebaikan-Kebaikan Tokoh Pendiri Negara,menguraikan tentang peran penting para tokoh pendiri negara, keteladanan, serta jasa-jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia.Modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian aktivitas penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Patuh menjalankan ajaran agama sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan melaksanakan tugas-tugas dalam mempelajari modul ini.
3. Menjelaskan pengertian konstitusi
4. Menjelaskan proses perumusan UUD Negara RI Tahun 1945.
5. Menjelaskan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
6. Menjelaskan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945.
7. Menjelaskan arti penting UUD Negara RI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
8. Mendeskripsikan peran tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945
9. Merefleksikan sikap, perilaku, dan karakter yang diteladankan oleh tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

UNIT 1 MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI



Gambar 2. Gedung Mahkamah Konstitusi

Perhatikan gambar di atas! Adakah hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengertian konstitusi, samakah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Apa tugas Mahkamah Konstitusi? Bagaimana proses perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi kita?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan Anda pelajari unit 3.1 ini.Unit ini akan menguraikan tentang pengertian konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang dasar khususnya mengenai proses perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



A. Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi dalam bahasa Inggris "constitution", berarti hukum dasar. Kontitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pegangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut undang-undang dasar. Di negara kita konstitusi tertulis tersebut dinamakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang meskipun tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Contoh pidato Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI).



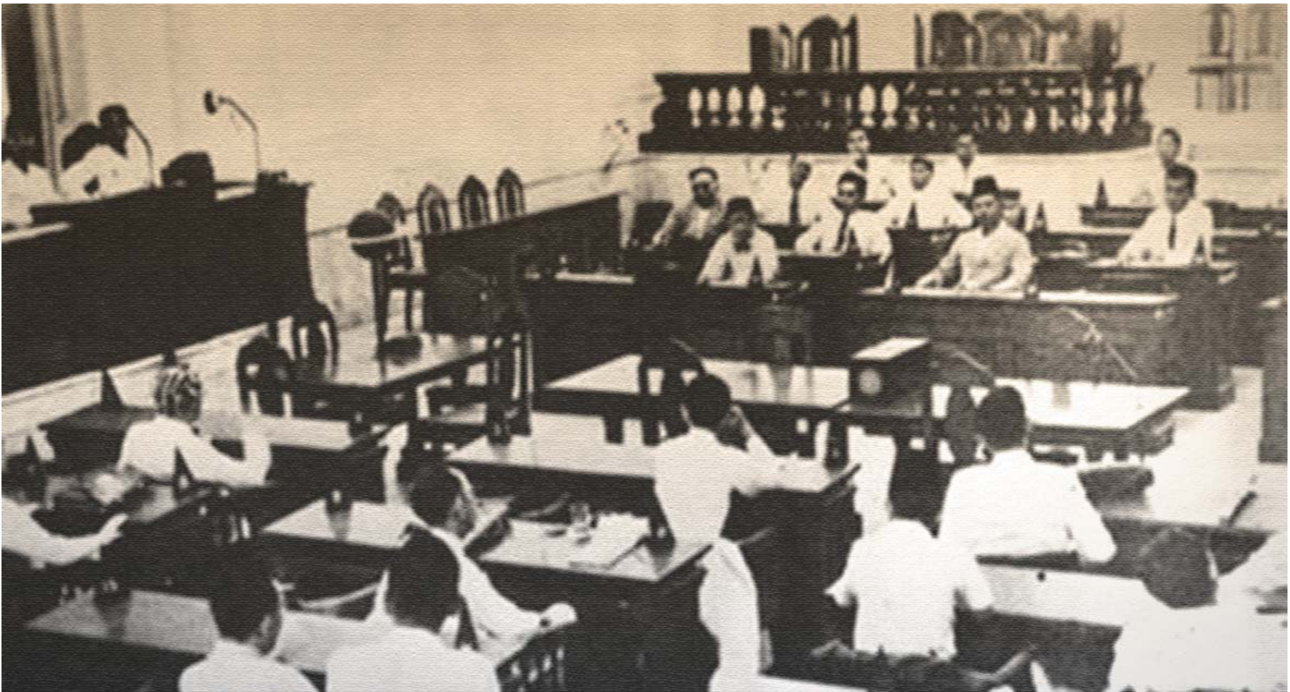


sumber: teraslampung.com/aktual.com

Gambar 3. Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 16 Agusus 2013 (kiri) dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo 16 Agusus 2017 (kanan)

Apa saja yang dimuat dalam Konstitusi? Pada umumnya suatu konstitusi memuat kesepakatan dasar yang dibuat oleh suatu bangsa yang meliputi tiga hal utama yaitu kesepakatan tentang: (1) tujuan atau cita-cita bersama, (2) aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, (3) bentuk negara dan prosedur ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara yang bertugas sebagai "penjaga konstitusi". Mahkamah Konstitusi bertugas menguji apakah suatu peraturan (undang-undang), sesuai atau tidak dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ternyata tidak sesuai, maka peraturan undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi tetap terjaga dengan baik.



sumber: tirto.co.id

Gambar 4. Sidang BPUPKI kedua

B. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kita telah belajar tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam modul 1. Perumusan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dalam sidangnya yang pertama yaitu pada 29 Mei - 1 Juni 1945.

Masih ingatkah Anda? Kapan sidang BPUPKI yang kedua dan membahas apa? Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung mulai pada 10-16 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar.

1. 10 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI Dr.Rajiman Wedyodiningrat dan diperkenalkannya anggota baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan.

Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (yang dibentuk pada masa sidang pertama), melaporkan hasil pekerjaannya yaitu:

a) Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan "selekas-lekasnya Indonesia Merdeka"

b) Panitia Sembilan telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta.

2. **11 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)**

   Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan anggota, dibentuklah panitia perancang hukum dasar yang terdiri atas 3 panitia kecil yaitu:

   a) Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno)
   b) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta)
   c) Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso).

   Rapat pada 11 Juli 1945 dimulai pukul 09.20 WIB, ini ditutup pada pukul 05.15 dini hari. Selanjutnya panitia kecil perancang hukum dasar bekerja sesuai tugasnya untuk dilaporkan pada sidang keesokan harinya pada 13 Juli 1945.

3. **13 Juli 1945 (Rapat Panitia Perancang UUD)**

   Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Pada 13 Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa.

4. **14 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)**

   Acara sidang 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia merdeka, dan pembukaan UUD. Sedangkan batang tubuh UUD-nya dibahas keesokan hari supaya anggota punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu.

5. **15 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)**

   Acara sidang 15 Juli 1945 adalah lanjutan pembahasan rancangan undang-undang dasar. Semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dsb.

6. **16 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)**

   Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan panitia tentang keuangan dan perekonomian serta laporan panitia pembelaan tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah undang-undang dasar akhirnyaditerima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945.

   Hasil sidang yang diterima secara bulat tersebut tergambar jelas dalam pidato Dr. Radjiman berikut ini:

"...Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terimadengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima, berdiri". Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan"

Setelah sidang BPUPKI yang kedua ditutup, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyunbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, dan Wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibahas dan disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

PENUGASAN

Telaah Perumusan Undang-Undang Dasar

Setelah mempelajari Materi Unit 1 ini selanjutnya silakan Anda menelaah proses perumusan UUD dalam sidang kedua BPUPKI mulai 10-16 Juli 1945, dan kemukakan pendapat Anda tentang suasana dan nilai-nilai yang tercermin dalam persidangan tersebut, serta dalam musyawarah mufakat di masa sekarang, dengan mengisi tabel LK 1 berikut.

1. **Tujuan**
   a. Anda akan lebih memahami proses perumusan Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   e. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-1)

No	Sidang Kedua BPUPKI	Uraian Singkat Pembahasan Sidang
1	10 Juli 1945	
2	11 Juli 1945	
3	13 Juli 1945	
4	14 Juli 1945	
5	15 Juli 1945	
6	16 Juli 1945	
7	Menurut Anda, bagaimanakah suasana sidang-sidang BPUPKI dalam merumuskan UUD Negara RI tahun 1945? Semangat dan nilai-nilai apakah yang tercermin dalamproses persidangan tersebut?	
8	Apakah nilai-nilai semangat kebangsaan dan musyawarah mufakat juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pada masa sekarang?	

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang perumusan UUD Negara RI Tahun 1945 silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan jawaban yang benar.

1. Pengertian konstitusi ialah ...
2. Konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu ... dan ...
3. Contoh dua macam konstitusi tersebut ialah ... dan ...
4. Kesepakatan dasar yang dimuat dalam suatu konstitusi biasanya adalah ...
5. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bertugas untuk ...
6. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI dibahas dalam sidang BPUPKI yang ke ... tanggal ... sampai dengan ...

7. Dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 dibentuklah tiga Panitia Kecil yaitu (1) ... (2) ... dan (3) ...
8. Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945 dibentuklah Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas (1) ... (2) ... dan (3) ...
9. Rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh peserta sidang BPUKI pada tanggal ...
10. Setelah sidang ditutup, tugas BPUPKI dianggap selesai dan dibubarkan, sebagai penggantinya dibentuklah ...

UNIT 2 MENJADI BANGSA YANG BERKONSTITUSI



sumber: tirto.co.id

Gambar 5. Suasana Sidang PPKI Agustus 1945

Setelah mempelajari proses persidangan BPUPKI yang kedua, yang menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar atau konstitusi di Unit 1, sekarang Anda akan mempelajari tentang proses pengesahannya.Kapan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan,dan oleh siapa? Bagaimanakah sistematika atau susunan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat disahkan? Apakah konstitusi itu penting bagi suatu negara? Mengapa?

A. Sidang PPKI 18 Agustus1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada 18 Agustus 1945. Sidang PPKI berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan dilandasi nilai-nilai nasionalisme yang tinggi tercermin dalam sikap kerelaan berkorban, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan.

Berikut ini adalah cuplikan jalannya sidang PPKI dalam acara pengesahan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI.

Ketua Soekarno:

Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada suatu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin, menurut kehendak rakyat, telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita pun bertindak di dalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar saja yang mengandung sejarah.

Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis- garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perobahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden."

Dalam sidang 18 Agustus 1945 PPKI berhasil menetapkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dengan pengesahan hasil sidang PPKI tersebut, maka Indonesia menjadi suatu negara yang berkonstitusi, negara yang memiliki undang-undang dasar, namanya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-II No.7 Tahun 1946, halaman 45-48.

B. Perubahan Naskah Piagam Jakarta

Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar maupun rancangan batang tubuh (pasal-pasal) pada naskah Piagam Jakarta hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan-perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2) Sila pertama, yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa."
3) Perubahan pasal 6 UUD yangberbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."
4) Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki susunan atau sistematika sebagai berikut.

1. Pembukaan yang berisi empat alinea;
2. Batang tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas:
   a. 16 bab
   b. 37 pasal
   c. 4 pasal aturan peralihan
   d. 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan terdiri atas:
   a. Penjelasan umum
   b. Penjelasan pasal demi pasal

Saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sudah mengalami amandemen (perubahan) sebagai upaya penyempurnaan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945”, yang merupakan pokok kaidah fondamental. Aturan dasar yang mengalami perubahan antara lain adalah tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelum ada perubahan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Coba Anda cari informasi aturan dasar lainnya yang mengalami perubahan.

D. Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

Seperti dikemukakan di depan, bahwa dalam permainan olahraga ada aturan main yang harus ditatati. Dalam keluarga yang merupakan kelompok terkecil masyarakat, juga ada aturan yang harus ditaati seluruh anggota keluarga. Demikian pula dalam masyarakat, kita sudah belajar tentang macam-macam norma.

Aturan-aturan itu penting agar kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Penyelenggara pemerintahan negara, dan warga negara Indonesia wajib patuh melaksanakan amanat UUD Negara RI Tahun 1945.



sumber: breakingnews.co.id

Gambar 6. Sidang Paripurna MPR

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yaitu hukum yang tertinggi dan fondamental.

Sebagai hukum dasar, UUD negara RI tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum dibawahnya. Segala hukum dan peraturan di Indonesia seperti ketetapan MPR (termasuk ketetapan MPR untuk mengubah UUD), berbagai macam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berpedoman pada UUD negara RI tahun 1945, tidak boleh bertentangan. Jika ada suatu peraturan bertentangan dengan UUD negara RI tahun 1945 maka peraturan tersebut harus batal demi hukum.

PENUGASAN

Menganalisis Arti Penting UUD Negara RI tahun 1945

Setelah mempelajari Materi Unit 3.2silakan Anda lanjutkan menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mencakup; apa manfaatnya bagi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, akibat jika tidak memiliki UUD, dampak jika warga negara tidak patuh, serta bagaimana sistematika UUD Negara RI Tahun 1945.

1. **Tujuan**
   a. Anda akan lebih memahami arti penting UUD Negara RI tahun 1945 bagi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 2
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   e. Mintalah konfirmasi tutor atas jawaban Anda.
   f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

No	Aspek	Uraian
1	Manfaat UUD negara RI tahun 1945 bagi warga masyarakat (warga negara Indonesia)	Manfaatnya yaitu ...
2	Manfaat UUD negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia	
3	Akibat bagi bangsa Indonesia jika tidak memiliki UUD	
4	Dampak yang timbul jika warga negara tidak patuh pada UUD negara RI tahun 1945	
5	Sistematika UUD negara RI tahun 1945 ketika disahkan PPKI 18 Agustus 1945	
6	Perubahan aturan dasar dalam UUD negara RI tahun 1945	

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang proses pengesahan UUD negara RI 1945, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh ...
   a. BPUPKI dalam Sidang I
   b. BPUPKI dalam Sidang II
   c. PPKI dalam Sidang hari pertama
   d. PPKI dalam Sidang hari kedua

2. Ketua PPKI yang memimpin Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah ...

   a. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
   b. Ir. Soekarno
   c. Mr. Moh. Yamin
   d. Drs. Moh. Hatta

3. Perhatikan pernyataan berikut.

   1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
   2) Membentuk Kementerian atau Departemen
   3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
   4) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
   5) Membentuk Komite Nasional Partai Indonesia

   Dari pernyataan tersebut, hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor ...

   a. (1); (2); dan (3)
   b. (1); (3); dan (4)
   c. (2); (3); dan (5)
   d. (2); (4); dan (5)

4. Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta yang dilakukan dalam Sidang PPKI adalah tentang ...

   a. Dihapusnya bagian penjelasan umum
   b. Dihapusnya penjelasan pasal demi pasal
   c. Kata mukadimah menjadi pembukaan
   d. Bertambahnya pasal-pasal batang tubuh UUD

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk ...

   a. Menyempurnakan aturan-aturan dasar
   b. Mengganti semua pasal dalam batang tubuh
   c. Menghapus penjelasan UUD RI tahun 1945
   d. Menambah jumlah bab dalam UUD RI tahun 1945

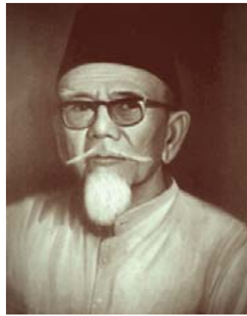
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, bukan hukum biasa melainkan hukum yang bersifat ...

   a. Umum
   b. Khusus
   c. Tak terbatas
   d. Fundamental

7. Sebagai hukum dasar UUD negara RI tahun 1945 memiliki arti yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu menjadi ...
   a. Sumber hukum bagi hukum-hukum di bawahnya
   b. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
   c. Menjadi pedoman tingkah laku warga negara
   d. Pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari
8. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka yang terjadi adalah ...
   a. Negara tersebut akan kacau dan hancur
   b. Tidak ada acuan untuk mengatur negara
   c. Rakyat akan memberontak pada negara
   d. Hak-hak warga negara tidak terlindungi
9. Sebagai hukum dasar UUD negara RI tahun 1945 harus dipatuhi oleh ...
   a. Lembaga-lembaga negara
   b. Lembaga perwakilan rakyat
   c. Penyelenggara pemerintahan
   d. Seluruh warga negara Indonesia
10. Salah satu kesepakatan dasar tentang amandemen atau perubahan UUD tegara RI tahun 1945 yaitu ...
   a. Tidak mengubah pembukaan UUD negara RI tahun 1945
   b. Mempertahankan penjelasan umum maupun pasal-pasal
   c. Mengganti semua pasal-pasal isi UUD negara RI tahun 1945
   d. Mengganti susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

UNIT 3 MENGINGAT KEBAIKAN-KEBAIKAN TOKOH PENDIRI NEGARA


Mr. Achmad Soebardjo


Haji Agoes Salim


Ir. Soekarno


Mohammad Hatta


A.A Maramis


KH Kahar Moezakir


R. Abikusno Tjokrosoejoso


Muhammad Yamin


KH Wahid Hasjim

sumber: wikivividly.com

Gambar 7. Panitia Sembilan BPUPKI

Siapakah yang dimaksud dengan tokoh pendiri negara, Bapak bangsa Indonesia atau yang sering disebut *The Founding Fathers*? Bapak bangsa Indonesia adalah julukan bagi tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Para tokoh yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Seperti menyusun rancangan dasar negara Indonesia merdeka, menyusun rancangan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka, menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, menyusun struktur Negara Republik Indonesia dan sebagainya hingga menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia. Pembahasan mengenai kebaikan dan keteladanan tokoh pendiri negara tentu terkait dengan tokoh-tokoh dalam BPUPKI dan PPKI.

Anggota BPUPKI maupun PPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia, orang-orang terpilih dan mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, maupun golongan kebangsaan pada masa itu. Siapa saja anggota BPUPKI dan PPKI tersebut?

A. Susunan Keanggotaan BPUPKI

Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat
Wakil Ketua : Itibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota:

1. Abikoesno Tjokrosejoso
2. Hadji Ah. Sanoesi
3. K.H. Abdul Halim
4. Prof. Dr.R.Asikin Widjajakoesoemo
5. M. Aris
6. Abdul Kadir
7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
8. B.P.H. Bintoro
9. Ki Hajar Dewantoro
10. A.M.Dasaat
11. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
12. Drs. Moh. Hatta
13. Ki Bagoes Hadikoesoemo
14. Mr. R. Hindromartono
15. Mr. Muh. Yamin
16. R.A.A. Sumitro Kolopaking P
17. Mr. Dr. R. Koesoemah Atmadja
18. Mr. J. Latuharhary
19. R.M. Margono Djojohadikoesoemo
20. Mr. A.A Maramis
21. K.H. Masjkoer
22. K.H.M. Mansoer
23. Moenandar
24. A.K. Moezakir
25. R. Oto Iskandar Dinata
26. Parada Harahap
27. B.P.H. Poeroebojo
28. R.Abdoellrahim Pratalykrama
29. R. Roeslan Wongsoekoesoemo
30. Prof. Ir. R. Rooseno
31. H. Agoes Salim
32. Dr. Samsi
33. Mr. R.M. Sartono
34. Mr.R. Samsoedin
35. Mr. R. Sastromoeljono
36. Mr. R. Singgih
37. Ir.Soekarno
38. R. Soedirman
39. R. Soekardjo Wirjopranoto
40. Dr. Soekiman
41. Mr. A.Soebardjo
42. Prof.Mr.Dr. Soepomo
43. Ir.R.M.P.Soerahman Tjokroadisoerjo
44. M.Soetardjo Kartohadikoesoemo
45. R.M.T.A. Soerjo
46. Mr. Soesanto
47. Mr. Soewandi
48. Drs.K.R.M.A. Sosrodiningrat
49. K.H.A. Wachid Hasjim
50. K.R.M.T.H. Woerjaningrat
51. R.A.A.Wiranata Koesoema
52. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro
53. Ny. Mr. Maria Ulfa Santoso
54. Ny.R.S.S.Soenarjo Mangoenpoespito
55. Oei Tjong Hauw
56. Oei Tiang Tjoei
57. Liem Koen Hian
58. Mr.Tan Eng Hoa
59. P.F. Dahler
60. A.Baswedan

Anggota Tambahan:

1. K.H. Abdul Fatah Hasan
2. R. Asikin Nata Negara
3. BKPA Soejo Hamidjojo
4. Ir. Pangeran M.Noor
5. Mr. M. Besar
6. Abdul Kaffar

B. Susunan Keanggotaan PPKI

Ketua : Ir. Soekarno Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta		
Anggota:		
1. Soepomo	7. Oto Iskandardinata	14. Abd. Abbas
2. Radjiman	8. Abdoel Kadir	15. Moeh. Hassan
3. Soeroso	9. Soerjohamidjojo	16. Hamidhan
4. Soetardjo	10. Poeroebojo	17. Ratulangie
5. W. Hasjim	11. Yap Tjwan Bing	18. Andipangeran
6. Ki Bagoes Hadikoesoemo	12. Latuharhary	19. I Gusti Ktut Pudja
	13. Dr. Amir	
Anggota Tambahan:		
1. Wiranatakoesoema	3. Mr. Kasman	5. Koesoema Soemantri
2. Ki Hadjar Dewantara	4. Sajuti	6. Soebardjo

sumber: Risalah Sidang BPUPKI – PPKI Th.1998

C. Peran Para Tokoh dalam Mendirikan Negara

Berdirinya Negara Republik Indonesia ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun demikian Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang serta merta terjadi. Peristiwa Proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiamerupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam usahanya mewujudkan cita-cita merdeka.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiatidak lepas dari peran para tokoh bangsa Indonesia dalam BPUPKI dan PPKI. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, ada perbedaan peran antara BPUPKI dengan PPKI. BPUPKI berperan dalam mengkaji dan menelaah, yaitu pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang BPUPKI di bahas dan ditanggapi oleh para anggota lainnya.

Sedangkan PPKI berperan untuk mengambil keputusan, pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang PPKI dirundingkandan dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan. Ada banyak sekali tokoh BPUPKI-PPKI yang berperan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantaranya ialah tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah BPUPKI. Sedangkan dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah PPKI.

Tokoh-tokoh BPUPKI yang memegang peran dalam proses perumusan hukum dasar tersebut antara lain ialah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI), Ir. Soekarno (anggota BPUPKI

yang menjadi Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar), Drs. Moh. Hatta (anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan), Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air). Ada pula Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Untuk lebih mengenal dan meneladani semangat serta komitmen para tokoh yang memegang peran penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar tersebut Anda dapat mengikuti uraian berikut ini.


Dr. K R T. Radjiman Wedyodiningrat

Dr. K R T. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI yang memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan BPUPKI sehingga menghasilkan keputusan-keputusan bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan benegara di Indonesia. Beliau seorang dokter yang lahir di Yogyakarta 21 April 1879, bertugas di RS Ingatan Lawang (1904-1906), di Keraton Solo (1906-1936).


Ir. Soekarno

Ir. Soekarno, Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ketua PPKI, Proklamator, dan Presiden RI yang Pertama. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh yang memegang peran sangat penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Sebagai Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ir. Soekarno bertanggungjawab memimpin rapat-rapat Panitia Kecil membahas segala sesuatu yang akan menjadi isi Undang-Undang Dasar. Penyiapan bahan-bahan rapat/ sidang, pembahasan materi dalam sidang sering berlangsung dari pagi sampai malam, bahkan hingga dinihari. Semua dilakukan demi terwujudnya hukum dasar yang menjadi salah satu persyaratan berdirinya Negara RI.


Drs. Mohammad Hatta

Drs. Mohammad Hatta, tokoh pejuang, negarawan, ahi ekonomi, proklamator, dan Wakil Presiden RI yang pertama. Beliau lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan. Drs. Mohammad Hatta memiliki hobi membaca dan rajin menulis. Buku-buku karya beliau sangat banyak. Karena rasa kepeduliannya terhadap rakyat dan perekonomian Indonesia, beliau membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan negara adalah memakmurkan rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan, maka menurut Bung Hatta bentuk usaha yang cocok untuk Indonesia adalah koperasi. (*sumber: https://www.jurnal.id diunduh 27 Desember 2017*)


Abikoesno Tjokrosoejoso

Abikoesno Tjokrosoejoso, lahir di Ponorogo, 15 Juni 1897. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau berperan sebagai Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang akan dibahas dalam sidang dan diputuskan menjadi bagian dari isi Undang-Undang Dasar.


Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadiningrat

Djajadiningrat, lengkapnya Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadiningrat, lahir 8 Desember 1886 di Kramat Watu, Kabupaten Serang. Beliau lulus dari Universitas Leiden bagian kesusasteraan dan filsafat. Tugas beliau dalam proses perumusan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai Tim Penghalus Bahasa bersama dengan Haji Agoes Salim, dan Mr. Soepomo. Husein Djajadiningrat dikenal sebagai salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remaja beliau dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan. Beliau juga dikenal sebagai ahli keislaman pada masanya, dan "Bapak metodologi penelitian sejarah Indonesia" (*sumber: https://id.m.wikipedia.org, diunduh 27 Desember 2017*)


Haji Agoes Salim

Haji Agoes Salim, lahir 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Pendidikan dasar ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia, dan saat lulus beliau menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Kemudian Haji Agoes salim bekerja sebagai penerjemah. Dalam proses perumusan hukum dasar, Haji Agoes Salim menjadi Tim Penghalus Bahasa. (*sumber: https://id.m.wikipedia.org, diunduh 27 Desember 2017*)


Prof. Mr. Dr.Soepomo

Prof. Mr. Dr.Soepomo, lahir 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Solo, wafat di Jakarta 22 Januari 1958. Beliau seorang ahli hukum yang karena pemikiran-pemikirannya tentang hukum dasar dikenal sebagai "arsitek" Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 bersama tokoh yang lain seperti Muhamad Yamin. Dalam Sidang BPUPKI Tanggal 31 Mei 1945 Mr. Soepomo mengusulkan rancangan dasar negara, bersama Ir. Soekarno, dan Mr. Muhamad Yamin. Dalam proses perumusan hukum dasar selain aktif menyampaikan pikiran-pikirannya, beliau juga dipercaya sebagai Tim Penghalus Bahasa untuk Rancangan Undang-Undang Dasar.

Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas hanyalah sebagian dari para tokoh pendiri negara.Selain tokoh-tokoh tersebut masih banyak lagi tokoh yang berperan dan berjasa dalam mendirikan negara. Siapa mereka, bisakah Anda menyebutkannya? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan. Agar seluruh unsur bangsa Indonesia dapat hidup dan bekerjasama dalam satu negara yang sama, diperlukan adanya kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan kehidupan kenegaraan akan diatur berdasarkan kekuasaan belaka.

Para pendiri negara bersepakat bahwa negara yang didirikan adalah Negara Kesatuan Republlik Indonesia, yaitu suatu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan, kebangsaan atau nasionalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan didasari oleh tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakatnya majemuk.

Sungguh luar biasa pemikiran, peran dan jasa para pendiri negara Indonesia. Kita patut bangga dan meneladani semangat kebangsaan maupun komitmen pada para pendiri negara, dalam merwujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendiri negara tersebut. Kita harus menjunjung tinggi kesepakatan nasional para pendiri negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara RI tahun 1945. Apa saja kesepakatan nasional para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD negara RI tahun 1945? Diantaranya ialah tentang susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD negara RI tahun 1945 merupakan pokok kaidah fundamental berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu tidak dapat diubah.

PENUGASAN

Keteladanan Tokoh Pendiri Negara

Setelah mempelajari materi unit 3 tentang Kebaikan-kebaikan para tokoh pendiri negara, Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan membuat tulisan singkat tentang sikap, perilaku, dan peran dari para tokoh pendiri negara yang patut diteladani oleh para generasi penerus bangsa Indonesia.

1. **Tujuan:**
   a. Agar Anda lebih mengenal tokoh pendiri negara, dan mengikuti teladan yang diberikan.
   b. Meningkatkan keterampilan Anda dalam menulis

2. Langkah-langkah Kegiatan

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 3
b. Siapkan kertas untuk menulis laporan
c. Pilih salah satu tokoh pendiri negara yang menarik perhatian Anda
d. Anda dapat menggali informasi sebanyak mungkin tentang tokoh yang Anda pilih dari berbagai sumber
e. Tuliskan biografi, peran, sikap, perilaku, komitmen kebangsaan, dan sebagainya yang melekat pada diri tokoh pilihan Anda tersebut.
f. Laporkan kepada tutor untuk mendapat penilaian
g. Selamat menulis dan tetap semangat!



MARI KITA INGAT KEMBALI

1. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua 10-16 Juli 1945. BPUPKI membentuk tiga panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan undang-undang dasar.
2. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 : (1) Mengesahkan UUD 1945; (2) Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
3. Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ketika disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.
   1) Pembukaan yang berisi empat alinea;
   2) Batang tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas:
      a. 16 bab
      b. 37 pasal
      c. 4 pasal aturan peralihan
      d. 2 ayat aturan tambahan
   3) Penjelasan terdiri atas:
      a. Penjelasan umum
      b. Penjelasan pasal demi pasal
4. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 4 : Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 40 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

ttd

Harris Iskandar

Daftar Isi



KEBERAGAMAN DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut! Terletak di pulau manakah keindahan alam yang sangat mempesona ini? Tahukah Anda berapa jumlah pulau di Indonesia dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya? Berapa jumlah provinsi, berapa jumlah suku bangsa di Indonesia?



sumber: www.goodnewsfromindonesia.id

Gambar 1. Pesona keindahan Raja Ampat

Pada Agustus 2017 Indonesia telah mendaftarkan lagi 2.590 pulau kepada PBB melalui forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names* (UNCSGN) dan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN), yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. Dengan demikian jumlah pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat ini yang sudah didaftarkan sebanyak 16.056 pulau. (*Sumber: Kompas.com, 21 Agustus 2017*).

Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah-Nya tersebut. Kita terlahir dan hidup sebagai bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang besar dan sangat kaya dengan keberagaman baik suku, budaya, adat istiadat, agama, ras, maupun golongan dalam masyarakat.

Bangsa yang dikaruniai wilayah sedemikian luas dengan segala keindahan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan serta keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan dan modal sosial yang besar untuk membangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Namun kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia tersebut sekaligus juga berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan kehancuran bangsa kita jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa" dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Apa, mengapa, dan bagaimana kita menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita pelajari Modul 4 dengan tema "Keberagaman Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika" berikut ini. Tiga unit dalam modul ini saling terkait karena semuanya menguraikan tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Unit 1 menguraikan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan bentuk-bentuk keragaman dalam masyarakat Indonesia. Unit 2 menguraikan faktor-faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan Unit 3 mengajak kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 4 bertema "Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika" ini terbagi dalam tiga subtema atau unit sebagai berikut.

Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
UNIT 1 **Satu untuk Semua, Semua untuk satu**	**UNIT 2** **Mengapa Aku Berbeda**	**UNIT 3** **Saling Toleransi**
Materi : • Makna Bhinneka Tunggal Ika • Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia 5 **Penugasan :** Melakukan pengamatan terhadap keberagaman yang terdapat di lingkungan kehidupan masyarakat daerahnya	**Materi :** • Faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia **Penugasan :** Menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia	**Materi :** • Perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama,ras, dan antargolongan **Penugasan :** Membuat tulisan tentang pengalamannya terkait dengan sikap positif yang mencerminkan toleransi dalam masyarakat yang beragam
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		

Unit 1 Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu", memuat penjelasan mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia yaitu keberagaman suku, agama dan kepercayaan, ras, serta antargolongan. Unit 2 Mengapa Aku Berbeda, memuat uraian tentang faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia, serta arti pentingnya memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Unit 3 Saling Toleransi, memuat contoh-contoh perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain uraian materi, modul juga dilengkapi dengan tugas dan latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian aktivitas penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Menghormati teman yang berbeda agama sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menunjukkan perilaku toleransi (saling menghormati) antar teman yang memiliki keberagaman latar belakang (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
3. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika
4. Menjelaskan keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia (suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antargolongan)
5. Menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.

UNIT 1

SATU UNTUK SEMUA, SEMUA UNTUK SATU

Pernahkan Anda mendengar slogan "Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu" Apa makna slogan tersebut? Pesan dalam slogan tersebut jelas yaitu tentang persatuan dan kebersamaan selaras dengan ikrar Sumpah Pemuda "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa" yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar di bawah ini?

Perangkat musik tradisional Indonesia dalam gambar tersebut masing-masing memiliki bentuk,



sumber: karlinasetiyanti.wordpress.com/www.europeana.eu/www.kamerabudaya.com/collections.nmmusd.org/www.hilltribeontario.com/budayajawa.id/dunia-kese nian.blogspot.com

Gambar 2. Alat musik tradisional Indonesia

ukuran, nama, bunyi (nada), dan tentu saja fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya merupakan satu kesatuan yang jika masing-masing dimainkan dengan baik secara bersama-sama akan menghasilkan suatu alunan musik yang indah. Demikian juga gambaran tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika dikelola dengan baik maka keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

A. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila, memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Kata "bhinneka" berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti "satu" dan "ika" berarti "itu". Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi "Beraneka Satu Itu" yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras, maupun antargolongan.

B. Keberagaman Suku di Indonesia

Apakah pengertian suku bangsa? Menurut Ensiklopedia Indonesia, suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota pada kelompok etnik (suku) dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi.

Menurut Frederick Bart, suku bangsa ialah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa atau merupakan kombinasi dari kategori-kategori tersebut, dan terikat pada sistem nilai budaya.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan identititasnya tersebut. Kesadaran akan identitas tersebut diperkuat dengan kesatuan bahasa.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bangsa adalah







sumber: bintantravel.co.id/ takaitu.com/lensakukar.com

Gambar 3. Suku Melayu (atas), Suku Mentawai (kiri bawah), dan Suku Dayak Kenyah (kanan bawah)

kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya, dan langsung melekat pada diri seseorang sesuai suku bangsa dari kedua orang tuanya. Secara umum suku bangsa di Indonesia ditentukan mengikuti garis paternalistik (ayah/laki-laki) seperti Suku Jawa dan Suku Batak. Tetapi ada juga penentuan suku yang mengikuti garis maternalistik (ibu/perempuan) contohnya Suku Minangkabau.

C. Ada Berapa Macam Suku Bangsa di Indonesia?

Berdasarkan buku Ensiklopedia Indonesia, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Jenisnya beragam, dan jumlahnya juga bervariasi di setiap wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok suku bangsa.

Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Kelompok Suku Jawa ini merupakan gabungan dari Suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah Suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa (15,5 persen), suku Batak sebanyak 8,5 juta (3,6 persen) dan suku asal Sulawesi lainnya sebanyak 7,6 juta jiwa (3,2 persen). Kelompok Suku Batak mencakup Suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan Dairi. Sedangkan kelompok suku bangsa asal Sulawesi lainnya merupakan gabungan dari sebanyak 208 jenis suku bangsa asal sulawesi, tidak termasuk Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo. (*Sumber: Sensus BPS 2010 hal:8*)



sumber: Netralnews.com

Gambar 4. Othek tradisi alat musik khas yang dimainkan Suku Osing

Berdasarkan daerah tempat tinggal, di pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Badui, Samin, dan lain-lain. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makasar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat, dan suku Dani.

Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun budayanya. Meskipun demikian keberagaman suku maupun budaya tersebut tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, keberagaman suku dan budaya Indonesia tersebut justru menjadi kekayaan luar biasa yang dimiliki Bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

D. Keberagaman Agama

Keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya hukum dasar negara kita

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Coba Anda perhatikan tempat-tempat ibadah berikut ini.













sumber: bryanleeflickrhivemind.com/www.indonesiatouristinformation.com/ www.dasiatravels.com/i.pinimg.com/www.idntimes.com

Gambar 6. Tempat Ibadah (a) Mesjid; (b) Gereja Kristen; (c) Gereja Katolik; (d) Pura; (e) Wihara; (f) Kelenteng

Agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian Negara Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat (2) UUD negara RI tahun 1945. Paham atheis yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, tidak boleh hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945.

Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui Pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Menurut sejarah sejak zaman dahulu, kekayaan alam Indonesia menarik pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Disamping berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Misalnya Hindu dan Budha dibawa oleh para pedagang bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Ajaran agama Kristen dan Katolik, dibawa oleh para pendatang dari Eropa. Sedangkan Konghucu diperkenalkan oleh para pedagang dari Cina.

Bangsa Indonesia dapat menerima ajaran-ajaran agama tersebut karena sebelumnya sudah mengenal dan mengakui bahwa di luar kekuatan dan kekuasaan manusia, ada kekuatan lain yang lebih besar yang dinyatakan dalam bentuk kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Dengan masuknya agama-agama yang dibawa oleh para pendatang tersebut, bangsa Indonesia menganut agama yang beragam sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Meskipun berbeda-beda namun ada kesamaan, yaitu semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan hidup yang benar. Hidup dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan dengan alam ciptaan-Nya. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara kita wajib saling menghormati, mengembangkan sikap toleran, dan bekerjasama untuk mewujudkan kerukunan hidup, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

E. Keberagaman Ras

Apakah yang dimaksud dengan ras? Ras berasal dari Bahasa latin radix yang artinya asal atau akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain adalah bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit.

Penggolongan berdasarkan bentuk badan, misalnya ada golongan ras yang memiliki tubuh ting-

gi besar, ada pula ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, atau ras yang memiliki tubuh kecil mungil. Bentuk muka, yaitu pengelompokan ras berdasarkan bentuk tulang pipi (ada yang menonjol, ada yang tidak). Bentuk hidung, dinilai dari panjang dan lebar hidung rata-rata sekelompok manusia, ada yang mancung, pesek, dan ada yang biasa/lebar.

Berikutnya adalah pengelompokan ras berdasarkan warna kulit, rambut, dan warna mata. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik ini merupakan penggolongan yang paling mudah dilihat. Ada kelompok manusia yang berkulit hitam, putih, kuning, atau sawo matang. Ada kelompok manusia yang mempunyai warna tengah mata hitam, biru, atau hijau. Sedangkan rambut, dapat dikelompokkan berdasarkan warna hitam dan putih/kuning, serta bentuk rambut lurus, ikal, dan keriting. A.L Krober seorang ahli yang mengamati perkembangan masyarakat, mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4 yaitu: (1) Ras Mongoloid, (2) Ras Negroid, (3) Ras Kaukasoid, dan (4) Ras Khusus. Bagaimana dengan keberagaman ras yang ada di Indonesia? Coba Anda amati gambar berikut ini.



Ras Mongoloid **Ras Negroid**

Setelah Anda mengamati gambar tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang kelompok ras yang ada dalam masyarakat Indonesia? Apakah Indonesia hanya memiliki satu jenis kelompok ras tertentu, atau terdiri atas berbagai macam ras? Jika Anda menjawab bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam kelompok ras, Anda benar!

Berdasarkan ciri-ciri fisik seperti yang terdapat dalam gambar tersebut, kira-kira ras apa saja yang mendiami



Ras Kaukasoid



Ras Khusus

Gambar 7. Macam-macam Ras

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain Ras Mongoloid, di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatic Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea, tersebar seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah Ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika, juga ada dalam masyarakat Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam ras tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai kehendak-Nya. Kita tidak dapat memilih untuk dilahirkan sebagai kelompok ras tertentu. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia apapun rasnya, memilki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.

F. Keberagaman Antargolongan

Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga keberagaman antargolongan.



sumber: fema.ipb.ac.id

Gambar 8. Gotong royong masyarakat pedesaan

Dalam sosiologi dikenal adanya "Stratifikasi Sosial" yaitu pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat kedalam kelas-kelas sosial secara bertingkat.

Ukuran atau kriteria yang menjadi dasar penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, dan keturunan. Contoh munculnya golongan sosial dalam masyarakat yang disebut "darah biru", "kelas atas", "kelas menengah", dan "kelas bawah".



sumber: kompas.com

Gambar 9. Cendekiawan

Disamping itu ada juga penggolongan lapisan masyarakat berdasarkan ukuran yang menyangkut pekerjaan atau profesi, agama, politik, dan sebagainya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal. Biasanya stratifikasi didasarkan pada kedudukan yang diperoleh melalui serangkain usaha perjuangan. (*http://blogpsikologi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-dan-contoh-stratifikasi.html, diakses 26 Desember 2017*)

Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Sebaiknya, keberagaman antargolongan justru harus menjadi pendorong terwujudnya kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman antargolongan harus menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh, pengusaha-pegusaha besar (golongan ekonomi kuat) wajib memberikan bantuan (dalam berbagai bentuk) bagi pengusaha-pengusaha kecil. Kelompok cendekiawan, membagikan pengetahuan dan ilmunya yang bermanfaat bagi banyak orang, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, demikanlah semboyan Bangsa Indoensia Bhinneka Tunggal Ika.

PENUGASAN

Pengamatan Terhadap Keberagaman Masyarakat

Setelah mempelajari materi unit 1 selanjutnya coba Anda lakukan pengamatan terhadap keberagaman yang terdapat dalam masyarakat di daerah tempat tinggal Anda, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan daerah tempat tinggal. Keberagaman yang Anda amati minimal mencakup keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Kemudian tulis hasil pengamatan Anda tersebut dalam format/tabel berikut dan simpulkan. Tuliskan penjelasan yang diperlukan dalam kolom keterangan.

1. **Tujuan**
   a. Anda lebih mengenali keberagaman yang ada dalam masyarakat di daerah Anda, dan diharapkan Anda menjadi lebih toleran terhadap perbedaan.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 1
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas

Lembar Kerja (LK-1)

Hasil Pengamatan Keberagaman Masyarakat di Daerah
(Tulis nama daerah Anda...)

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan	Keterangan
1	Keberagaman Suku	Tulis keberagaman suku yang ada di daerah Anda, misal: Suku Jawa, Madura, dst	Tulis penjelasan yang diperlukan, misal: di RT/RW saya mayoritas Jawa, ada sekitar 5 KK Suku Madura, ...
2	Keberagaman Agama yang dianut masyarakat	....	....
3	Keberagaman Ras	....	....
4	Keberagaman Antargolongan dalam masyarakat	....	....
Kesimpulan: (tulis simpulan tentang keberagaman di daerah Anda)			

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d.

1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada ...
   a. Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila
   b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   c. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
   d. Lambang Negara Garuda Pancasila
2. Kata "bhinneka" secara harfiah mengandung arti ...
   a. Beraneka ragam atau berbeda-beda
   b. Beraneka macam suku bangsa
   c. Berbeda-beda suku, ras dan agama
   d. Walaupun berbeda-beda tetapi satu
3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perwujudan sila-sila Pancasila khususnya sila ...
   a. Pertama
   b. Kedua
   c. Ketiga
   d. Kelima
4. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku bangsa. Berapakah perkiraan jumlah suku bangsa Indonesia?
   a. 31 suku bangsa
   b. 34 suku bangsa
   c. 208 suku bangsa
   d. 1.300-an suku bangsa
5. "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ...
   a. Pasal 27
   b. Pasal 28
   c. Pasal 29
   d. Pasal 30

6. “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Oleh karena itu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh hidup di Indonesia. Paham yang dimaksud ialah ...

   a. Atheis
   b. Religius
   c. Individualis
   d. Liberalis

7. Negara memberikan jaminan kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya da kepercayaannya itu. Jaminan tersebut terdapat di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ...

   a. Pasal 29 ayat (1)
   b. Pasal 29 ayat (2)
   c. Pasal 30 ayat (1)
   d. Pasal 30 ayat (3)

8. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan ...

   a. keturunan dan kekayaan harta benda
   b. ciri-ciri fisik, dan rumpun bangsa
   c. ilmu pengetahuan dan pendidikan
   d. status sosial dalam masyarakat

9. Perhatikan pernyataan berikut!

   (1) Mongoloid
   (2) Negroid
   (3) Melanosoid
   (4) Bushman
   (5) Kaukasoid
   (6) Veddoid

   Dari pernyataan tersebut, jenis ras yang terdapat dalam masyarakat Indonesia terutama ditunjukkan nomor ...

   a. (1); (2); dan (3)
   b. (1); (3); dan (5)
   c. (2); (4); dan (6)
   d. (3); (4); dan (6)

10. Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib ...

a. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan
b. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama
c. Menjalin persaudaraan dengan orang sukunya sama
d. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Sebutkan macam-macam agama yang diakui secara resmi oleh Negara Republik Indonesia.
2. Apa makna keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan masyarakat bagi bangsa Indonesia?
3. Bagaimana mewujudkan kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam?
4. Dalam kehidupan masyarakat ada “stratifikasi sosial” Apa maksudnya? Jelaskan!

UNIT 2 MENGAPA AKU BERBEDA?

Pada unit 1 Anda sudah mempelajari keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang mencakup keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Selanjutnya dalam unit 2 ini Anda akan mempelajari lebih dalam lagi tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum membahas tentang faktor penyebab keberagaman dalam masyakat Indonesia, coba Anda amati gambar berikut ini. Apa yang terlintas dalam benak Anda saat mengamati gambar? Ternyata berbeda itu indah! Ada warna-warni, ada keceriaan, kebersamaan, dan keindahan, di dalam keberagaman.

Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut kehendak-Nya. Manusia tercipta dengan karakteristik atau ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain, dengan kelebihan, kekurangan, dan keunikan masing-masing. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikodratkan untuk menempati wilayah di kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan segala bentuk keberagamannya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya tersebut.


sumber: detik.com

Gambar 10.
Berbeda itu Indah

A. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Letak Strategis Wilayah Indonesia

Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 54.716 kilometer. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang dan berbatasan dengan banyak negara tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.



sumber: abelpetrus.files.wordpress.com

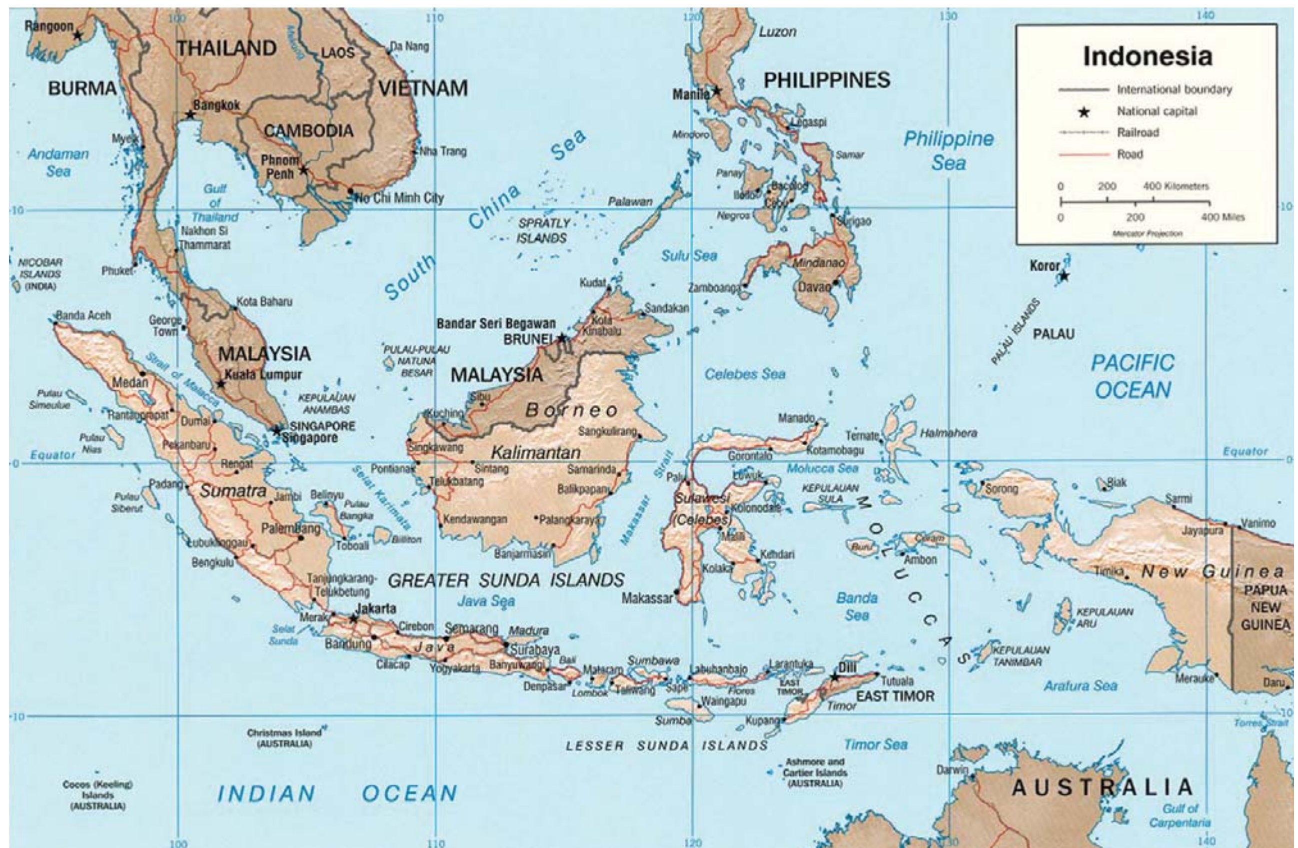
Gambar 11. Posisi silang letak geografis Indonesia

Mengapa demikian? Karena letaknya yang strategis wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. Pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya masyarakat Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, dan kemudian menetap di Indonesia menyebabkan kemajemukan ras, agama dan bahasa dalam masyarakat bangsa Indonesia.

b. Kodisi Negara Kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Saat ini sudah 16.056 pulau yang sudah didaftarkan di PBB. Pulau-pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke tersebut dihubungkan oleh lautan yang seakan-akan terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini.

Kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut. Karena hambatan jarak, yang dihubungkan



sumber: wikipedia.org

Gambar 12. Peta negara Indonesia

oleh lautan tersebut menjadikan masyarakat di kepulauan Indonesia mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, sistem kepercayaan, agama, maupun peranan laki-laki dan perempuan.

c. Perbedaan Kondisi Alam

Perbedaan kondisi alam suatu daerah, berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat suatu daerah. Masyarakat dae-





sumber: kompasiana/abangsyamsulblogspot

Gambar 13. Daerah pegunungan dan pantai

rah pegunungan umumnya memiliki mata pencaharian bercocok tanam sebagai petani, masyarakat pantai hidup sebagai nelayan dengan mencari ikan. Sementara masyarakat daerah yang lain hidup dengan berdagang.

d. Keadaan Transportasi dan Komunikasi

Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain. Pada zaman dahulu belum ada sarana dan prasarana komunikasi seperti yang ada sekarang ini. Karena itu sarana transportasi maupun komunikasi yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.



Gambar 14. Media sosial



sumber: liputan6.com/wikipedia/railwayenthusiastdigest/idntimes.com/aktual.com/ sahjaya's placewordpress.com

Gambar 15. Berbagai macam arana transportasi



B. Penerimaan Masyarakat Terhadap Perubahan

Faktor lain penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan, juga berpengaruh terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang sangat terbuka dan mudah menerima orang asing atau budaya lain, namun ada juga masyarakat bersifat tertutup, tidak mudah menerima pengaruh dan tetap bertahan pada kebiasaan maupun budaya sendiri. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Masyarakat yang bersikap terbuka terhadap pengaruh luar, dan dapat menerima perubahan atau kemajuan teknologi tentu akan lebih maju dibanding masyarakat yang tertutup, yang tidak mau menerima perubahan.







sumber: independensi.com/mesinpertanian-saam.blogspot.com

Gambar 16. Terbuka terhadap perubahan (atas), memetik padi secara tradisional (kiri bawah, dan memanen padi dengan alat modern (kanan bawah)

PENUGASAN

Menganalisis Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Setelah mempelajari materi unit 2 ini silakan Anda lanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, kemudian simpulkan. Anda dapat mengerjakan tugas analisis tersebut dengan mengisi format LK-2 yang tersedia.

1. **Tujuan**
   a. Anda akan lebih memahami faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia.
2. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 2
   b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
   c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
   e. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)

Analisis Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

No	Faktor Penyebab	Keberagaman yang Terjadi
1	....	....
2	....	....
3	....	....
4	....	....
Kesimpulan:		

LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d.

1. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, yaitu ...
   a. Asia dan Amerika, Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik
   b. Asia dan Australia, Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik
   c. Asia dan Australia, Samudera Indonesia dan Samudera Atlantik
   d. Australia dan Eropa, Samudera Indonesia dan Samudera Atlantik
2. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan ...
   a. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai
   b. Banyaknya orang asing yang berdatangan sebagai wisatawan
   c. Indonesia menjadi rebutan bangsa lain untuk menguasai
   d. Melimpahnya komoditas perdagangan yang dimiliki Indonesia
3. Para pedagang dari bangsa lain yang berdatangan di Indonesia bukan hanya membawa komoditas dagang atau barang dagangan tetapi juga membawa pengaruh lain seperti ...
   a. Cara bercocok tanam, dan sistem sosial
   b. Pembagian peran laki-laki dan perempuan
   c. Perubahan warna kulit, ras, dan ciri-ciri fisik
   d. Kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa
4. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berapa jumlah pulau yang sudah didaftarkan Indonesia ke PBB?
   a. 13.000-an pulau
   b. 15.000-an pulau
   c. 16.000-an pulau
   d. 16.056 pulau

5. Kondisi sebagai negara kepulauan juga mempengaruhi keberagaman adat-istiadat, dan budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh ...

    a. Tidak adanya komunikasi masyarakat antar pulau
    b. TIngkat kemajuan dan lingkungan daerah yang sama
    c. Setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri
    d. Jarak antara pulau satu dengan lainnya yang sangat jauh

6. Perbedaan kondisi alam suatu daerah, berdampak pada perbedaan-perbedaan terutama seperti perbedaan ...

    a. Harkat, derajat, dan maratabat manusia di hadapan Tuhan YME
    b. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan hidup
    c. Sistem pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan
    d. Mata pencaharian, bentuk rumah, dan kebiasaan

7. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan pada umumnya ...

    a. Bertani
    b. Berternak
    c. Pencari ikan
    d. Berdagang

8. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah ...

    a. Bertani
    b. Berternak
    c. Nelayan
    d. Berdagang

9. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan ... karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah.

    a. Komunikasi dan transportasi
    b. Sistem sosial dan kekayaan alam
    c. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan
    d. Pengetahuan dan kemampuan berdagang

10. Kesediaan untuk menerima perubahan atau pembaharuan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya ...

    a. Tertutup terhadap segala pengaruh dari luar
    b. Bersifat terbuka terhadap suatu perubahan
    c. Bertahan pada pengetahuan dan budayanya sendiri
    d. Mengikuti budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apa maksudnya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemajemukan bangsa Indonesia? Jelaskan!
3. "Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika" Apa makna ungkapan ini? Jelaskan!
4. Apakah perbedaan kondisi alam dapat menyebabkan perbedaan budaya masyarakat? Mengapa? Jelaskan alasannya.
5. Kondisi sebagai negara kepulauan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Mengapa? Jelaskan!

UNIT 3 SALING TOLERANSI

Pada unit 1 dan 2 Anda telah mempelajari keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Pada unit ketiga dari modul empat ini Anda akan mempelajari tentang sikap dan perilaku saling toleransi. Dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud. Oleh karena itu walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana membangun sikap dan perilaku saling toleransi dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, dan ras, serta keberagaman sosial budaya di Indonesia? Silakan Anda baca uraian materi berikut ini.

A. Perilaku Toleran dalam Kehidupan Beragama

Ada enam agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat



sumber: tajuktimur.com

Gambar 17. Kerukunan antar umat beragama

menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2). Karena itu pemeluk-pemeluk agama yang beragam tersebut wajib bersikap dan berperilaku saling toleran agar terwjud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang rukun, bersatu dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Presiden keempat Indonesia K.H Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan nama panggilan Gus Dur adalah tokoh nasional yang dijuluki "Bapak Pluralisme Indonesia". Ajaran beliau tentang pluralisme diantaranya terkandung dalam pernyataan memotivasi dan inspiratif yang sangat terkenal yaitu "tidak penting apa pun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu" (Gus Dur).

Perhatikan gambar berikut ini. Indahnya kebersamaan, saling menolong dan berbagi tanpa memandang perbedaan adalah nilai-nilai yang tercermin dalam gambar.





sumber: thebuddhisme.net/keepo.me

Gambar 18. Saling tolong menolong antar umat beragama

Sebagai orang beriman kita yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia berbeda satu sama lain, Tuhan sendirilah yang menciptakan perbedaan. Oleh karena itu membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku bangsa, maupun agama adalah perilaku diskriminatif yang harus dihindari. Perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Dengan keberagaman kita menjadi bangsa yang besar dan toleran, dan juga menjadi bangsa yang kuat.
Contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama antara lain sebagai berikut.

a. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar
b. Menghormati agama dan keyakinan orang lain
c. Menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama
d. Menjaga kerukunan hidup diantara umat seagama maupun beda agama
e. Saling menolong diantara umat seagama maupun antar agama
f. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain



B. Perilaku Toleran dalam Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Apakah Anda punya teman yang berbeda etnis atau suku, dan ras dengan Anda? Samakah perlakuan Anda terhadap teman tersebut dengan teman lain dari suku yang sama dengan Anda?



sumber: gettyimages

Gambar 19. Multikuluralisme



sumber: eddielikublogspot.com

Gambar 20. Teater tradisional

Sebagaimana telah kita pelajari di depan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis atau suku bangsa dan ras. Sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa jika kita terlahir sebagai bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya tersebut. Karena itu perbedaan etnis atau suku bangsa dan ras bukanlah suatu hambatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia.

Semua manusia di dunia ini apapun warna kulit, ras, dan suku bangsanya memiliki kedudukan, harkat, derajat dan martabat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan tersebut dengan saling toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis atau suku bangsa, dan ras tertentu menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding dengan etnis lain. Hal yang membedakan adalah baik atau buruknya sikap dan perilaku seseorang, bukan etnis atau suku bangsa dan rasnya.

Karena itu perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya, kita merasa lebih baik dari orang lain. Baik atau buruknya seseorang tergantung pada tindakan dan perilaku orang tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berperilaku baik terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan etnis, suku bangsa, maupun rasnya.



C. Perilaku Toleran dalam Keberagaman Sosial Budaya

Keberagaman dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan luar biasa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sudah semestinya kita mensyukuri anugerah tersebut, menjaga, melindungi, dan mengelola dengan baik budaya positif bangsa kita agar menjadi modal sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk membangun di tengah arus globalisasi yang tak terbendung. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Mengapa mereka belajar tentang budaya kita?



sumber: www.jia-xiang.biz/radarmalang.id

Gambar 21. Orang asing belajar budaya Indonesia

Banyak orang asing yang mengagumi budaya Indonesia dan mempelajari dengan sungguh-sungguh budaya kita. Kita patut bangga akan hal tersebut. Namun lebih dari itu kita pun wajib menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang luar biasa tersebut. Bagaimana caranya?



sumber: ugm.ac.id

Gambar 22. Toleran dalam keberagaman budaya

Sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia kita dapat ikut berpartisipasi menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya bangsa kita antara lain dengan:

a. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
b. Mengenali dengan baik ciri khas atau karakteristik budaya daerahnya
c. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya yang disukai atau diminati.
d. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri.
e. Mampu menyaring dan tidak mengikuti budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Keberagaman dalam kehidupan sosial, bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi, maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan, namun sebaliknya justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

PENUGASAN

Laporan Pengalaman Tentang Toleransi

Setelah mempelajari materi unit 3 tentang "Saling Toleransi" selanjutnya Anda diminta untuk menuliskan pengalaman hidup Anda, terkait dengan peristiwa, kejadian, atau sikap-sikap positif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang mencerminkan toleransi. Aspek-aspek yang akan dinilai dari laporan Anda adalah kesesuaian isi dengan tema, keruntutan penulisan, dan ketepatan waktu penyelesaian tugas sesuai kesepakatan.

A. Tujuan

a. Dapat mengomunikasikan pengalaman hidup Anda terkait dengan sikap dan perilaku saling toleransi kepada orang lain melalui tulisan.

b. Terdorong untuk mengembangkan sikap dan perilaku toleran terhadap sesama di dalam keberagaman.

B. Langkah-langkah Kegiatan

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 3

b. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas

c. Kerjakan tugas menggunakan Lembar Kerja (LK-3) berikut ini

d. Mintalah konfirmasi tutor atas jawaban Anda.

e. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-3)

Pengalamanku Tentang Saling Toleransi

....

....

....

....

....

....

....



MARI KITA INGAT KEMBALI

1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang legara Indonesia Garuda Pancasila. Maknanya ialah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia.
2. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain ialah keberagaman suku bangsa, agama, ras, budaya, dan antargolongan.
3. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting: (1) keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang manjadi modal sosial luar biasa untuk membangun bangsa Indonesia yang sejahtera, (2) Keberagaman bangsa Indonesia juga memiliki potensi negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan dilandasi kesadaran pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.
4. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain : (1) Letak strategis wilayah Indonesia (2) Kondisi negara kepulauan (3) Perbedaan kondisi alam (4) Keadaan transportasi dan komunikasi (5) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
5. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III
Modul Tema 5 : Gotong Royong

- **Penulis:** Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi



GOTONG ROYONG



Pengantar Modul

Anda pasti sudah paham bahwa manusia sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Manusia akan selalu hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam berhubungan dengan orang lain manusia tidak boleh memaksakan kehendak dan mau menang sendiri tanpa memperhatikan manusia disekitarnya. Kalau itu terjadi bukan suasana hidup nyaman, damai dan tentram tidak akan tercapai. Manusia harus bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Dengan kerjasama maka kehidupan akan terjalin harmonis dan kebutuhan masing-masing manusia akan tercapai.

Untuk memahami pentingnya gotong royong, modul ini didesain dengan langkah pertama memberikan pemahaman tentang makna dan arti kerjasama. Setelah memiliki pemahaman kerjasama, diharapkan muncul sikap pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan warga belajar dapat melaksanakan berbagai bentuk kerjasama dalam dalam kehidupan keseharian.



sumber: www.kbknews.id

Gambar 1. Gotong royong dalam bermasyarakat



Petunjuk Penggunaan Modul

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada warga belajar dengan materi Modul 5 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan judul “Gotong Royong”. Materi modul ini adalah.

Untuk memudahkan memahami modul ini perhatikan petunjuk berikut ini:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klrisikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan.
6. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Gotong Royong		
UNIT 1 **Indahnya dalam Kebersamaan**	**UNIT 2** **Bersama Kita dapat Melakukan Banyak Hal**	**UNIT 3** **Gotong Royong untuk Negeri**
Materi : • Arti dan Makna Kerjasama • Unsur-unsur dalam kerjasama **Penugasan :** Membuat laporan singkat aktivitas kerjasama	**Materi :** • Pentingnya kerjasama dalam masyarakat **Penugasan :** Membuat Kliping gambar tentang kegiatan kerjasama dalam kehidupan masyarakat	**Materi :** • Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat **Penugasan :** Membuat laporan kegiatan gotong royong yang dilakukan dilingkungan sekitar
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN		



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan warga belajar memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang mencerminkan kerjasama dan gotong royong di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Pemahaman tentang makna dan pentingnya kerjasama/gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Keterampilan membuat laporan singkat terkait kegiatan keseharian yang berkaitan dengan peran daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

UNIT 1 INDAHNYA DALAM KEBERSAMAAN

PERLU DIRENUNGKAN

Pernahkah Anda melihat permainan sepakbola? Tentu kita semua pernah melihat sepakbola. Kalau kita perhatikan lebih teliti, ternyata setiap pemain mempunyai tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Kiper bertugas menjaga supaya gawang tidak sampai kemasukan bola. Bek bertugas membantu kiper pertahanan dalam mempertahankan gawang sekaligus mengumpankan bola ke pemain penyerang.Gelandang adalah bertugas menghubungkan antara bek dan penyerang. Penyerang bertugas untuk menciptakan gol. Supaya tim menang maka perlu dilakukan kerjasama antar pemain. Coba sekarang anda bayangkan, bagaimana jika tidak ada kerjasama diantara tim tersebut? Tentu saja tim tidak akan menangkan? Disinilah pentingnya kerjasama sangat diperlukan dalam permainan sepakbola. Termasuk juga dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakan yang tentram dan harmonis.

Nah kalau anda baca teks di atas, kita akan sadar bahwa kerjasama sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Salah satu supaya manusia dapat memenuhi kebutuhannya adalah dengan kerjasama. Kerjasama tidak dilakukan dalam hanya dalam satu bidang saja, namun kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.

Coba Anda perhatikan gambar ini! Kerjasama dalam membersihkan lingkungan supaya asri dan indah dilakukan dengan semangat persaudaraan penuh kebersamaan tanpa membedakan yang kaya dan miskin untuk mencapai tujuan bersama.Indahnya jika suasana kehidupan semua berjalan dengan saling bekerjasama antara satu dengan lainnya dalam suasana yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.



sumber: 4.bp.blogspot.com

Gambar 2. Kerjasama membersihkan lingkungan

Tahukah Anda? Bagaimana bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan Indonesia setelah lama dijajah oleh kaum penjajah? Kemerdekaan Negara Indonesia yang telah dicapai adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan bentuk kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia dalam bersatu padu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kerjasama dalam mengusir penjajah saat itu dilakukan seluruh rakyat Indonesia dengan sepenuh jiwa tanpa memandang perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, agama, dan bahasa. Perbedaan yang ada pada saat itu bukanlah merupakan penghalang untuk bersatu, namun menjadi unsur yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemerdekaan yang telah bangsa Indonesia capai adalah kemerdekaan untuk semua masyarakat Indonesia. Tantangan untuk mengisi kemerdekaan semakin berat. Bagiamana mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa.Tujuan Nasional bangsa Indonesia tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Coba Anda ingat kembali tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut.Kemudian renungkanlah bagaimana tujuan nasional tersebut bisa terwujud? Tentu saja tujuan nasional dapat tercapai adalah dengan adanya kerjasama antara semua komponen bangsa Indonesia dalam membangun bangsa.



A. Arti dan Makna Kerjasama

Kerja sama berasal daribahasa Inggris yaitu “Cooperate”, “Cooperation”, atau “Cooperative”. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerja sama atau bekerjasama. Adapun pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sering juga disebut gotong royong.

Kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai mahkluk sosial manusia penuh dengan keterbatasan. Dengan keterbatasan tersebut manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia akan mempunyai makna ketika hidup bersama dengan orang lain (bermasyarakat). Manusia akan merasa memiliki arti ketika berada disekeliling manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut kerjasama sebagai dampak dari interaksi manusia diperlukan untuk terciptanyan kehidupan yang harmonis.

Di Indonesia terdapat berbagai macam istilah kerjasama yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya daerah masing-masing seperti *Gugur Gunung* (Yogyakarta), *Sambatan* (Jawa Tengah), *Mapalus* (Minahasa), *Ammosi* (Sulawesi Selatan), *Subak* (Bali), *Siadapari* (Sumatera Utara), *Manunggal Sakato* (Sumatera Barat) dan masih banyak lagi sebutan istilah kerjasama yang lainnya. Nah bisakah anda menyebutkan istilah kerjasama yang ada pada daerah tempat Anda tinggal?

Salah satu bentuk kerjasama adalah gotong-royong. Gotong Royong berasal dari istilah “gotong” yang berarti “bekerja” dan “royong” berarti “bersama“. Secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Gotong royong juga dapat diartikan sebagai partisipan aktif setiap individu masyarakat yang ikut terlibat dan mendapatkan nilai positif setiap objek, permasalahan, atau kebutuhan orang disekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut dapat berupa tenaga, materi, mental, keterampilan atau lain sebagainya.

Untuk mendapatkan pengertian kerjasama dengan benar marilah kita perhatikan pendapat para ahli berikut ini.





sumber: antara.com/kompasiana.com

Gambar 3. Gotong royong masyarakat Minahasa (kiri), Gugur Gunung masyarakat Yogyakarta (kanan)

1. Soerjono Soekanto (2006: 66), menyatakan kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.
2. Basrowi (2005:145), kerjasama merupakan proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.
3. Pamudji, mengartikan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, ada tiga unsur yang terkandung dalam kerjasama yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, serta adanya tujuan yang sama

Nah berdasarkan pengertian kerjasama dari para ahli di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kerjasama adalah bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang saling berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip-prinsip dalam kerjasama ada tiga yaitu:

1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
2. Memperhatikan kepentingan bersama
3. Saling menguntungkan

Mari kita renungkan!

Bagaimana sikap kita jika ada kerjasama dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik dan merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum? Apa yang harus kita lakukan?

Ada lima bentuk kerjasama jika dilihat dari pelaksanaannya menurut Soerjono Soekanto (2006: 68) yaitu kerukunan, *bargaining*, kooptasi, koalisi, dan *joint venture*. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut.

1. **Kerukunan** yaitu bentuk kerjasama yang sering dijumpai dalam masyarakat yang bentuknya sederhana.

   Contoh:

   a. Membantu dengan cara bergotong royong jika ada tetangga yang rumahnya rusak atau roboh karena terkena musibah.
   b. Bekerjasama memperbaiki di desa jembatan yang rusak.

2. ***Bergaining***, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.

   Contoh:

   a. Tawar menawar saat pembelian barang yang terjadi antara pembeli dan penjual.
   b. Penentuan harga saat membeli barang, misalnya membeli sepeda motor, TV, Almari da lain sebagainya.
3. **Kooptasi**, yaitu proses suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi.

   Contoh:

   a. Menerima pendapat dari orang lain dengan penuh lapang dada.
   b. Pemerintah membuat peraturan tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani masalah korupsi.
4. **Koalisi,** yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.

   Contoh:

   a. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) dalam membuat peraturan perundang-undangan.
   b. Kerjasama dua partai politik atau lebih untuk memenagkan pemilihan umum.
5. ***Joint venture***, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu.

   Contoh: .

   a. Dua perusahaan yang melakukan kerjasama untuk meningkatkan hasil produksi
   b. Dua perusahan kerjasama dalam penjualan hasi produksi. Misal Perusahaan A (memproduksi benang) bekerjasama dengan Perusahaan B (menghasilkan baju).

Bedasarkan tempat terjadinya, M Taufan (2017:77-78) menyatakan bentuk kerjasama dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kerjasama primer danm kerjasama sekunder.

1. **Kerjasama primer**, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok primer yaitu keluarga. Dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah setiap orang yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Misalnya, ibu, ayah, anak, kakaek, nenek, dan pembantu rumah tangga.
2. **Kerjasama sekunder**, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok sekunder (kelompok yang terdapat diluar lingkungan keluarga). Misal organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.

Setelah membaca uraian di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini! Jika anda masih mengalami kesulitan anda bisa berkonsultasi pada tutor pembimbing anda.

a. Mengapa manusia harus kerjasama?
b. Sebutkan manfaat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat!
c. Berikan masing-masing 2 contoh kerjasama yang berbentuk kerukunan, *bargaining*, kooptasi, koalisi, dan *joint venture*!

B. Unsur-unsur dalam Kerjasama

Pada bagian di atas telah dijelaskan apa arti kerjasama, bentuk kerjasama dan manfaat kerjasama. Lalu kerjasama bisa muncul kapan? Pertanyaan ini tentu saja akan muncul dan membuat kita untuk berpikir kembali.

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna.



sumber: www.lemsaneg.go.id

Gambar 4. Penandatanganan kerjasama

Kerjasama tidak akan muncul ketika setiap orang tidak mempunyai kepentingan yang sama. Ketika masing-masing orang berbeda kepentingan maka kesadaran untuk saling bekerjasama tidak akan muncul. Tetapi ketika beberapa orang mempunyai kepentingan yang sama maka untuk memenuhi kebutuhan terpenuhinya kepentingan bersama orang akan menyadari bahwa mereka saling membutuhkan.

Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut J.B. Chitambar (dalam Sajogyo,1992) adalah:

1. **Motivasi pribadi**, ini berarti tujuan-tujuan pribadi dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya.
2. **Kepentingan umum,** kepentingan umum atau kepentingan bersama berdasarkan tujuan

yang dianggap bernilai tinggi dapat pula memberi motivasi kepada orang-orang atau kelomok-kelompok dan organisasi untuk bekerja sama.

3. **Motivasi altruistik,** motivasi ini bersumber darikeinginan seseorang untuk menolong pihak lain kerena panggilan hati, misalnya kelompok sukarela yang berniat menolong suatu pihak yang memerlukan bantuan.
4. **Tuntutan situasi**, misalnya karena musibah banjir, orang-orang tergerak untuk menanggu-langinya.

PENUGASAN

1. Buatlah laporan singkat aktivitas kerjasama anda dalam kegiatan keseharian di lingkungan tempat tinggal anda. Identifikasikan kegiatan apa saja yang anda lakukan. Ceritakan aktivitas anda dalam kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian uraikan pula apa manfaat yang anda dapat dengan melakukan aktivitas kerjasama tersebut pada tabel dibawah ini.

No	Bentuk Kerjasama dalam Aktivitas Kesehariaan yang Anda Lakukan	Manfaat yang anda peroleh dengan bekerjasama dalam kegiatan tersebut
1		1 .... 2 .... 3 ....
2		1 .... 2 .... 3 ....
3		1 .... 2 .... 3 ....
4		1 .... 2 .... 3 ....
5		1 .... 2 .... 3 ....

2. **Tujuan**

   Setelah melaksanakan tugas mandiri ini warga belajar dapat memahami bentuk-bentuk kerjasama dan arti penting atau manfaat kerjasama dalam kehidupan keseharian sehingga memunculkan sikap untuk hidup bekerjasama antar sesama dalam kehidupan keseharian.

3. Media

a. Lembar Kerja
b. Alat Tulis

4. Langkah-langkah Kegiatan

a. Baca kembali dan pahami uraian materi tentang arti, makna, dan unsur-unsur kerjasama
b. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan/aktivitas masyarakat di sekitar lingkungan saudara. Bawalah selalu kertas dan alat tulis untuk mencatat segala kegiatan/aktivitas masyarakat tersebut.
c. Tuliskan kembali hasil pencatatan saudara pada tabel yang disediakan.

UNIT 2 BERSAMA KITA DAPAT MELAKUKAN BANYAK HAL



Pentingnya Kerjasama dalam Masyarakat

Seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, tentu anda masih ingat bahwa kerjasama adalah kegiatan atau interaksi atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih, saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan karena diselesaikan secara bersama-sama. Kerjasama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina kehidupan masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Coba anda bayangkan jika bagaimana jika anggota tubuh kita antara kaki kiri dan kanan tidak mau kerjasama, kita tentu saja akan mengalami kesulitan untuk melangkah. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat yang beranekaragam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat, kerjasama sangat diperlukan. Jika terbina kerjasama yang baik maka keharmonisan hidup masyarakat akan terjamin dan akhirnya akan berdampak pada terciptanya perasaan saling memiliki dalam semangat persatuan dan kesatuan pada masyarakat Indonesia sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kokoh.

Seperti diketahui masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dilihat dari aspek bahasa, budaya, agama, maupun kelompok-kelompok sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, Kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih sebuah kebutuhan bagi seseorang. Untuk dapat bekerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengembangkan sikap-sikap yang mendukung terjadinya kerjasama dalam masyarakat.

Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat.Adanya keberagaman itu, justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa.Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusif.Sikap ekseklusivisme dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Arti penting kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:

1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan

2. Mempererat persaudaraan dan kerukunan
3. Menghilangkan perbedaan dan menciptakan kebersamaan
4. Membangun semangat gotong royong
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
6. Kehidupan bermasyarakat menjadi nyaman, tenteram dan damai

Untuk lebih mengetahui arti pentingnya kerjasama di lingkungan masyarakat perhatikan gambar di bawah ini.





sumber: swarakendal.com/imdonainces.blogspot.com

Gambar 5. kerja bakti membersihkan kali (kiri) dan kerjasama membersihkan lingkungan (kanan)

Perhatikanlah dan cermati gambar di atas!

a. Apa yang terjadi jika kegiatan di atas dilakukan oleh seseorang secara sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama?
b. Apa keuntungan yang didapatkan jika kegiatan di atas dilakukan dengan cara berkerjasama secara bersama-sama!
c. Coba anda sebutkan apa saja pentingnya kerjasama dengan melihat gambar tersebut dalam kehidupan masyarakat!

Namun seiring dengan kemajuan jaman, budaya kerjasama yang ada saat ini sudah mulai luntur. Faktor-faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama antara lain:

1. Munculnya egois yaitu sikap individu yang mau menang sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama.
2. Munculnya pergeseran pola berfikir dan pola hidup akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa

3. Munculnya sikap yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan untung dan rugi
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan.

PENUGASAN

1. Carilah 5 lima gambar tentang kegiatan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dari buku, majalah, atau koran. Buatlah kliping tentang gambar-gambar tersebut. Kemudian buatlah tulisan singkat terkait gambar tersebut dengan memperhatikan tabel berikut.

No	Gambar	Penjelasan Gambar
1	(tempelkan gambar di sini)	
2		
3		
4		

2. **Tujuan**

   Warga belajar dapat memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran untuk selalu bekerjasama dengan sesama anggota masyarakat yang lainnya

3. **Media**
   a. Lembar Kerja
   b. Penggaris dan alat Tulis
   c. Surat Kabar, Majalah dan Internet

4. **Langkah-langkah Kegiatan**
   a. Carilah 5 gambar tentang kerjasama yang dapat anda temukan di majalah, buku, maupun koran di rumah.
   b. Potonglah gambar tersebut dengan rapi, kemudian bacalah dengan cermat berita yang terkait dengan gambar tersebut.
   c. Buatlah table sesuai dengan contoh yang diberikan. Tempelkan gambar pada kolom yang telah disediakan, kemudian tulis kembali tentang keterangan gambar tersebut sesuai dengan kalimat anda sendiri

UNIT 3 GOTONG ROYONG UNTUK NEGERI

Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan Dimasyarakat

Pada bab awal sudah dijelaskan bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai status sebagai mahkluk social yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat fisik maupun kebutuhan yang bersifat non fisik. Manusia menurut aristoteles disebut sebagai *zoon politicon* artinya manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Untuk itu perllu dipupuk sikap kerjasama antara satu dengan lainnya dalam segala bidang kehidupan di masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga sampai dengan lingkup terluas yaitu bangsa dan Negara.

Dalam bidang apa saja kerjasama di masyarakat dapat dilakukan? Tentu saja kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Dalam lingkup yang lebih sempit kerjasama dapat juga dilakukan dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas kerjasama dilakukan diberbagai bidang baik dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kerjasama antar umat beragama.

Marilah kita cermati berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyakat mulai dari lingkup yang sempit keluarga, sekolah sampai dengan lingkup yang luas masyarakat di bawah ini.

1. Bentuk Kerjasama di Lingkungan Rumah

Mari kita sejenak melihat lingkungan rumah kita.Ada siapa saja dalam rumah kita? Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam kehidupan bermasyarakat.Walaupun masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan pertama pengenalan pendidikan sebelum sampai kemasyarakat.Setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Setiap anggota keluarga harus memahami peran dan kedudukannya, saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, dan saling membantu sehingga tercipta lingkungan keluarga yang harmonis.

Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditunjukkan antar anggota keluarga antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah
2. Menjaga kebersihan lingkungan rumah
3. Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga
4. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama

2. Bentuk Kerjasama dalam Kehidupan Masyarakat

Masyarakat terdiri dari beberapa individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam waktu yang lama, mempunyai aturan yang mengatur bagaimana warga masyarakat berperilaku sehingga memunculkan kesadaran diri pada setiap warganya sebagai satu kesatuan. Kesadaran diri sebagai satu kesatuan akan mendorong terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis, nyaman, tertib dan tenteram.

Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat antara lain.

1. Pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan
2. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan
3. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
4. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat

Disamping bentuk kerjasama di atas, ada kerjasama dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas (kehidupan berbangsa dan bernegara). Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang lebih luas (kehidupan berbangsa dan bernegara) antara lain kerjasama antar umat beragama, kerjasama dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan.

3. Bentuk Kerjasama dalam Bidang Politik

Kehidupan politik di Indonesia harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila yaitu sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Nilai dari sila keempat ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat degan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan suatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. (Ari Tri Soegito.2016:89)

Sistem pemerintahan yang terjabar dalam sila keempat ini dinamakan “Demokrasi Pancasila”, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Sedangkan yang menjadi pangkal tolak Demokrasi Pancasila adalah paham kekeluargaan dan kebersamaan.

Dalam mewujudkan nilai demokrasi Pancasila semua manusia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh

karena itu dalam menggunakan haknya setiap individu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada individu lainnya.



sumber: www.rappler.com

Gambar 6. Penyandang Disabilitas sedang memberikan suaranya

Jika dilihat secara historis (Suyahmo.2014:171) masalah kerakyatan sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat di Sumatra Barat, terutama dalam adat Minangkabau yang terkenal dengan semboyan ”Tuah Sakato” yang artinya dalam pengambilan keputusan bersama dianggap mengandung “Tuah atau Berkat” Disamping itu juga ada ungkapan: Bulat di pembuluh bulat kata di mufakat” yang artinya kesepakatan adalah jalan yang paling baik dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu di dalam mengambil keputusan, semua anggota masyarakat diikutsertakan sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama. Sehingga di Minangkabau ada tempat untuk mengadakan musyawarah yang disebut dengan “Balaerung Sari”. Di Jawa dikenal juga dengan adanya rembug desa yang melibatkan semua warga masyarakat, kepala desa,pamong, tokoh masyarakat dengan mengambil tempat di balai desa. Tujuannya tidak lain adalah untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dengan jalan untuk musyawarah mufakat.

Bentuk kerjasama dalam bidang Politik dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:

1. Ikut serta dalam memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, pemilihan umum
2. Ikut membantu bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara
3. Menjaga bersama-sama agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar

4. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya

Sebagai bangsa yang hidup penuh dengan keberagaman, berbagai permasalahan baik permasalahan social maupun permasalahan budaya pasti tidak bisa dihindari. Permasalahan social yang sering kita jumpai di masyarakat antara lain kemiskinan, pengangguran, balapan liar, pelanggaran terhadap aturan atau norma, tawuran dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal itu semua warga masyarakat perlu bekerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga kehidupan masyarakat menjadi tentaram.

Bentuk kerjasama dalam bidang sosial tersebut dapat dilakukan antara lain melalui.

1. Gotong royong memperbaiki jembatan yang roboh, kebersihan lingkungan, menjaga kepentingan lingkungan yang sifatnya untuk kepentingan umum
2. Membantu tetangga saat mengalami kesusahan, misalnya bersama-sama membantu mendirikan rumah tetangga yang roboh karena angin topan.
3. Membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan
4. Memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada peristiwa criminal disekitarnya.





sumber: v-threefreez.blogspot.com/ sutantogayamsari51.blogspot.com

Gambar 7. Kerjasama membersihkan lingkungan (kiri), Forum kemitraan polisi dan masyarakat (kanan)

Kemajemukan masyarakat menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tiap daerah dengan masyarakat daerah tersebut mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Untuk itu dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antargolongan.

Bentuk kerjasama dalam masyarakat dalam bidang budaya dapat dilakukan melaui.

1. Menghormati dan menghargai keberagaman budaya didaerah dengan mengadakan festival budaya









sumber: flores-borneo.blogspot.com/BreakingNews.co.id/travelingyuk.com/infopublik.id

Gambar 8. Keanekaragaman budaya daerah

2. Melaksanakan pertukaran budaya daerah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan
3. Bekerjasama menjalin persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme.

5. Bentuk Kerjasama Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian bangsa Indonesia adalah perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini terdapat dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keberadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berasaskan kekeluargaan mengandung arti bahwa dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.



sumber: dinasdukcapil.bojonegorokab.go.id

Gambar 9. Rapat anggota Koperasi

Berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiga pelaku perekonomian di Indonesia adalah koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .

Bentuk kerjasama bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara.

1. Kerjasama dalam membayar pajak, dimana para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, sementara pemerintah dengan kewenangannya menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Kerjasama mendirikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, dimana koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota.

3. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil.

6. Bentuk Kerjasama Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945.

Letak Indonesia yang berada diposisi silang antara dua samudera dan dua benua menempatkan Indonesia pada posisi strategis yang suatu saat harus siaga ketika terjadi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari dalam. Dengan letak wilayah negara yang strategis ini, bangsa Indonesia diharapkan mempunyai sistem pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa"tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara". Hal ini berarti bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Apakah bela Negara itu? Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.Negara Indonesia menjadi kuat jika ada kerjasama yang kokoh antara semua komponen bangsa dalam mempertahankan Negara Indonesia.



sumber: katamedia.co

Gambar 10. Diklat bela begara di Bogor

Berdasarkan pengertian upaya bela negara, apakah kalian pernah ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Apabila kalian pernah ikut serta menjaga wilayah negara termasuk wilayah lingkungan sekitar dari gangguan atau ancaman yang membahayakan kesela-matan bangsa dan negara berarti kalian sudah berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan NKRI juga menunjukkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara.

Bentuk Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara.

1. Melaksanakan kegiatan ronda malam atau Siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar.
2. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi.
3. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela Negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.

7. Bentuk Kerjasama Antar Umat Beragama

Sebagai bangsa yang religius, negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan ke-



sumber: www.inovasee.com

Gambar 11. Kerukunan beragaman di Indonesia

percayaannya itu. Kita perlu berbangga menjadi warga negara Indonesia karena walaupun berbeda-beda agama tetapi semangat persatuan dan kesatuan masih sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan kerukunan dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat antar umat beragama yang ada di Indonesia.

Kerjasama antarumat beragama bukan bukanlah kerjasama dalam hal keyakinan agama. Kerjasama yang diwujudkan adalah kerjasama dalam hal lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi.

Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain.

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat seagama dan umat yang berbeda beragama
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing,
4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara
5. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama

Sikap-sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain.

1. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar
2. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri.
3. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah.

Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara.

1. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam
2. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.
3. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah.
4. Bekerja sama dan tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama.
5. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

PENUGASAN

1. Anda pasti pernah mengikuti kegiatan kerjasama/gotong royong dilingkungan masyarakat sekitar Anda. Buatlah laporan kegiatan gotong royong yang telah Anda dilakukan dilingkungan sekitar anda. Sebagai pendukung laporan ini sertakan dokumentasi dengan foto kegiatan Anda ketika melaksanakan kegiatan. Untuk pengambilan foto bisa menggunakan kamera digital maupun kamera pada *handphone* Anda. Jika tidak ada media untuk pengambilan gambar maka Anda boleh melukis dengan tangan sendiri dengan ketentuan lukisan harus menggambarkan partisipasi Anda dalam kegiatan kerjasama di masyarakat. Adapun sistematika laporan kegiatan yang Anda buat adalah sebagai berikut.

Gotong Royong untuk Negeri

1. Bentuk kegiatan	:	(contoh Kerja bakti membersihkan ... dll)
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	(tulis hari, tanggal, waktu)
3. Tempat Kegiatan	:	(tuliskan sesuai dengan tempat kegiatan)
4. Peserta kegiatan	:	(tuliskan siapa saja yang ikut dan darimana saja)
5. Aktivitas yang anda lakukan	:	(ceritakan sesuai dengan aktivitas yang Anda lakukan pada saat kegiatan secara berurutan, runtut dan mudah dipahami)

6. Manfaat dari kegiatan tersebut	:	(tuliskan apa yang anda rasakan dengan adanya kegiatan yang anda lakukan)
7. Dokumentasi kegiatan	:	lampirkan 4 buah foto kemudian diberikan keterangan di bawahnya.

2. Tujuan

Penugasan ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan menjadi warga masyarakat yang baik dengan menerapkan sikap kerjasama di lingkungan warga belajar.

3. Media

a. Lembar Kerja
b. Alat Tulis dan Penggaris
c. Kamera atau HP untuk dokumentasi

4. Langkah-langkah Kegiatan

a. Bacalah petunjuk dan sistematika penyusunan laporan kegiatan.
b. Laporan dituliskan pada kertas HVS F4, dengan diketik/tulisan tangan
c. Laporan yang telah selesai diserahkan kepada tutor pembimbing.
d. Jangan lupa tuliskan identitas diri (nama dan nomor absen)



MARI INGAT KEMBALI

1. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.
2. Prinsip-prinsip dalam kerjasama ada tiga yaitu, berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, dan saling menguntungkan.
3. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama adalah adanya motivasi pribadi, ini berarti tujuan-tujuan pribadi dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya, adanya kepentingan umum sebagai tujuan yang ingin dicapai, motivasi keinginan seseorang untuk menolong pihak lain kerena panggilan hati, dan adanya tuntutan situasi.
4. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme.
5. Dalam lingkup yang lebih sempit kerjasama dapat juga dilakukan dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas kerjasama dilakukan diberbagai bidang baik dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kerjasama antar umat beragama.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu disebut ...

   a. Kerja sama b. Persatuan c. Toleransi d. Tenggang rasa

2. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip dalam kerjasama adalah …

   a. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik,
   b. Memperhatikan kepentingan bersama,
   c. Menghargai kepentingan yang mendukung saja
   d. Saling menguntungkan.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama antara lain, kecuali:

   a. Munculnya egois yaitu sikap individu yang mau menang sendiri.
   b. Mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai kebahagiaan bersama
   c. Pergeseran pola berfikir dan pola hidup akibat pengaruh budaya asing.
   d. Sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan untung dan rugi

4. Sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah disebut ...

   a. Fanatik sempit b. Ekseklusivisme c. Primordialisme d. Hedoisme

5. Menurut Pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas ...

   a. Gotong royong b. Kebermaknaan c. Kekeluargaan d. Kebersamaan

6. Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat adalah seperti yang tercantum di bawah ini, kecuali ...

   a. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
   b. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara
   c. Bekerjasama dalam segala hal termasuk hal keyakinan agama
   d. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama

7. Berasaskan kekeluargaan mengandung artibahwa dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai ...
   a. Kesejahteraan bersama secara adil.
   b. Keuntungan bersama secara adil
   c. Tercapainya kebutuhan setiap manusia
   d. Hak dan kewajiban masing-masing
8. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara adalah ...
   a. Setiap penduduk Indonesia
   b. Setiap warga Negara Indonesia
   c. Setiap orang yang tinggal di Indonesia
   d. Setiap penduduk Indonesia yang sudah memenuhi persayaratan
9. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang menjadi pangkal tolak demokrasi Pancasila adalah …
   a. Perstuan dan kesatuan
   b. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
   c. kekeluargaan dan kebersamaan.
   d. Pemerataan pembangunan
10. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah …
    a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
    b. Memajukan kesejahteraan umum
    c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
    d. Ikut serta dalam usaha mewujudkan kemajuan ekonomi

B. Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan 5 bentuk kerjasama dilihat dari pelaksanaannya! Jelaskan!
2. Sebutkan arti penting kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat!
3. Sebutkan 3 prinsip yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat!
4. Sebutkan 3 perwujudan kerjasama dalam masyarakat pada bidang pertahanan dan kemanan!
5. Sebutkan 3 sikap sebagai bentuk perwujudan kerjasama di lingkungan keluarga!